



KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



ITAPS  
INSTITUTE FOR TRADE POLICY  
AND STRATEGY  
IPB University  
Bogor Indonesia

# TRADE POLICY ADVISORY GROUP

## *Theme #6*

### *Leveraging ASEAN Chairmanship: Formulating Priority for ASEAN Deliverables*

Jakarta, February 23, 2023

#### Content

1. Policy Brief
  2. Event Flyer
  3. Infographics
  4. Powerpoint Presentation
-

## TRADE POLICY ADVISORY GROUP

### COORDINATOR

1. Dr. Kasan
2. Dr. Lili Yan Ing

### KEY EXPERTS

1. Brian Wong
2. Ichwan Nasution
3. Maria Monica Wihardja
4. Aladdin Rillo

### CONTRIBUTORS

1. Dr. Widyastutik
2. Dr. Eisha Rachbini

### POLICY/RESEARCH TEAMS

#### ITAPS-IPB

1. Siti Riska Ulfah Hidayanti, SE, M.Si
2. Syarifah Amaliah, SE, M.App.Ec
3. Dewi Setyawati, SP, M.Si
4. Sri Retno Wahyu Nugraheni, SE, M.Si

#### BKPERDAG

1. Iskandar Panjaitan
2. Immanuel Lingga
3. Aditya Paramita Alhayat
4. Sefiani Rayadiani
5. Septika Tri Ardiyanti
6. Titis Kusuma Lestari
7. Niki Barendra Sari
8. Choirin Nisaa
9. Farida Rahmawati
10. Steven R. Ingot
11. Siti Mir'atul Khasanah
12. Annisa Aulani Kusnadi

#### ERIA

1. Dr. Doan Ha
2. Yessy Vadilla
3. Livia Nazara
4. Ivana Markus

### PUBLICATION TEAM

1. Primakrisna Trisnoputri
2. Athifah Syauqin Aryndani
3. Andrika Sembiring
4. Erwin Abdiwijaya
5. Dwi Yulianto

### SECRETARIAT TEAM

1. Sri Astuti
2. Emil Fadri
3. Megawati
4. Sri Rejeki Hutapea
5. Maulida Lestari
6. Dini Ramadhani
7. Achmad Sigit Santoso
8. Iqbal Musyaffa
9. Maria Rosari
10. Putri Khairani
11. Hasna Fairuz
12. Refina Raisa Alna
13. Areta Citamaja
14. Sabrina Pratiwi
15. Fitriana W.R.
16. Lely Supriati
17. Catherin Nur Safitri

# POLICY BRIEF

## *Leveraging ASEAN Chairmanship: Formulating Priority for ASEAN Deliverables*

### RINGKASAN EKSEKUTIF

Di tahun 2023, Indonesia memegang Keketuaan ASEAN, dengan tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”, dimana salah satu isu prioritas ekonomi yang diangkat adalah digital economy. Sebagai pilar utama, transformasi digital di ASEAN diharapkan dapat menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan dan dunia. Penggerak utama transformasi digital ASEAN diantaranya adalah potensi ekonomi ASEAN yang kuat secara fundamental, jumlah penduduk yang besar, dimana populasi generasi muda juga besar. Selain itu, tingginya pengguna internet ASEAN juga turut mendukung proses transformasi digital ASEAN.

Keseriusan negara member ASEAN dalam mendorong transformasi digital telah ditunjukkan dengan adanya perjanjian kerjasama di bidang digital sejak awal tahun 2000. Kerjasama terkait dengan digital ekonomi dalam ruang lingkup ASEAN, diantaranya ASEAN Agreement on Electronic Commerce, 2018; e-ASEAN Framework Agreement, 2000; ASEAN Digital Master Plan 2025 Bandar Seri Begawan Roadmap (BSBR), 2021; dan Boracay Digital Declaration, 2023.

Indonesia, dalam Keketuaan ASEAN, juga menyadari bahwa ASEAN memiliki potensi percepatan digital dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Sebagai negara member ASEAN, Indonesia juga memiliki potensi percepatan ekonomi digital, seperti jumlah populasi, kapasitas produksi dan sumber daya manusia. Dengan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang pesat dalam beberapa tahun ini, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi leader di ASEAN dapat menjadi trend setter dan standard setter yang bisa diikuti negara ASEAN.

Oleh karena itu, perlu dirumuskan upaya strategis bagaimana Indonesia membawa kepentingan nasional dalam forum ASEAN Digital Economic Framework Agreement (DEFA).

Upaya dan dukungan kebijakan strategis yang perlu diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk memperkuat kesiapan digital Indonesia dalam menghadapi ASEAN DEFA adalah sebagai berikut: (1) Mendukung dan memfasilitasi terwujudnya transformasi digital yang inklusif; (2) Memberikan prioritas dan memfasilitasi pelaku usaha dan sektor ekonomi dalam melakukan inovasi digital teknologi yang memberikan manfaat dan membantu aktivitas manusia; (3) Memfokuskan pada peraturan pemerintah dalam rangka penyempurnaan undang-undang keamanan siber, privasi data, dan peraturan persaingan. (4) Melakukan pemetaan kesiapan digital Indonesia.

Selain itu, langkah dan upaya strategis untuk memperkuat digital readiness perlu diambil oleh Pemerintah Indonesia, dalam konteks Keketuaan ASEAN dan forum ASEAN DEFA adalah sebagai berikut: (1) Mengkonstruksikan kerangka peraturan yang koheren untuk ekonomi digital sebagai upaya kolektif prioritas yang harus dilakukan untuk mempromosikan transparansi dalam desain dan implementasi peraturan digital intra ASEAN; (2) Perlunya pemahaman yang sama pada lingkup ASEAN mengenai apa itu teknologi tepat guna (*appropriate technology*) sebagai upaya untuk membentuk ASEAN Digital Community di masa depan; (3) Perlu pemetaan elemen kunci dan prioritas dari digital ekonomi yang akan diadopsi dalam ASEAN DEFA; (4) Perlu upaya bersama untuk membangun *enabling ecosystem* dalam rangka meningkatkan daya tarik *business group* di ASEAN untuk melakukan diversifikasi bisnisnya pada digital teknologi; (5) Mendorong akselerasi akses *microfinancing* di ASEAN sehingga mampu P2P kepada *small enterprises*; (6) Diperlukan kesepakatan dan kerjasama bersama berupa program akselerasi transformasi digital yang inklusif dalam upaya mengurangi kesenjangan dalam kesiapan digital antar negara ASEAN.

## **LATAR BELAKANG**

**ASEAN memiliki peluang untuk berakselerasi dan berada di garis depan ekonomi digital global.** Penggerak utama transformasi digital ASEAN diantaranya karena ASEAN memiliki potensi yang luar biasa dengan fundamental ekonomi yang kuat seperti ukuran pasar yang besar dan menarik dengan 670 juta penduduk, cukup besarnya populasi kaum muda yang paham teknologi dan penetrasi internet yang meningkat. Tingginya pengguna internet ASEAN juga turut mendukung proses transformasi digital ASEAN, yaitu sebanyak 460 juta pengguna internet lama dan 100 juta pengguna internet baru pada masa pandemi Covid-19. Jika dilihat lebih lanjut, sebanyak 88% pengguna internet ASEAN adalah pengguna *smartphone* dan telah aktif dalam melakukan pembayaran digital yang diperkirakan akan naik 1,1 miliar USD pada tahun 2025. Sementara itu, untuk Indonesia, pengguna internet juga mengalami peningkatan dari waktu ke waktu dengan jumlah pengguna internet mencapai 210 juta penduduk di tahun 2022 dengan tingkat penetrasi internet tumbuh 77,02% pada 2021-2022<sup>1</sup>. Potensi pengembangan sektor digital di Indonesia juga ditunjukkan dengan cukup banyaknya perangkat seluler yang terhubung ke internet sebanyak 370,1 juta penduduk di tahun 2022 dan lebih dari 210 juta penduduk Indonesia terhubung ke internet selama tahun 2021-2022.

**Potensi digital ASEAN yang sangat besar ini didukung dengan keseriusan pemerintah di lingkup ASEAN yang ditunjukkan dengan adanya perjanjian kerjasama di bidang digital semenjak awal 2000-an.** Kerjasama di bidang digital diantaranya pada tahun 2018 dengan ASEAN *Agreement on Electronic Commerce*; tahun 2000 disepakati *e-ASEAN Framework Agreement*; tahun 2021 dengan ASEAN *Digital Master Plan 2025* Bandar Seri Begawan *Roadmap (BSBR)* dan pada tahun 2023 *Boracay Digital Declaration*.

**ASEAN termasuk Indonesia menyadari bahwa digital transformation adalah salah**

---

<sup>1</sup> [https://apjii.or.id/berita/d/apjii-di-indonesia-digital-outlook-2022\\_857](https://apjii.or.id/berita/d/apjii-di-indonesia-digital-outlook-2022_857)

**satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia dan ASEAN.** Potensi nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2021 mencapai 70 miliar USD dan diprediksi terus meningkat hingga mencapai nilai 146 miliar USD di tahun 2025, bahkan dapat mencapai 315,5 miliar USD di tahun 2030 mendatang. Besarnya ukuran digitalisasi di ASEAN diharapkan dapat mendorong perkembangan ekonomi, khususnya pada sektor-sektor seperti *e-commerce*, media online, layanan keuangan, dan *ride-hailing* dalam rangka mencatat pertumbuhan yang solid di masa yang akan datang.

**Indonesia memiliki potensi sebagai trend setter dalam pengembangan transformasi digital di ASEAN.** Pada tingkat ASEAN, Indonesia memiliki ukuran pasar (*market size*) dan kapasitas produksi yang besar dilihat dari aspek sumber daya manusia. Indonesia memiliki peluang untuk menjadi *leader* di ASEAN sehingga menjadi *trend setter* dan *standard setter* yang bisa diikuti negara ASEAN lainnya terlepas dengan kondisi saat ini Singapura yang mendominasi dan lebih maju komitmennya pada aspek digital dan institusi. Cita-cita ini memungkinkan karena mengingat pasar yang besar akan menarik perusahaan digital (*unicorn* dan *decacorn*) original dari Indonesia mengeksplorasi pasar di ASEAN. Lebih lanjut, peluang itu menjadi besar apabila disertai dengan kehadiran *area silicon valey* perusahaan ASEAN di Indonesia sehingga Indonesia menjadi basis pengembangan ekonomi digital di ASEAN. Saat ini, Indonesia memiliki jumlah *startup* terbanyak di kawasan ASEAN dengan jumlah 2.345 *startup* pada tahun 2022 (*Startupraking 2022*), valuasi beberapa *startup* Indonesia telah mencapai status *decacorn* dengan valuasi di atas 10 milyar USD dan *Unicorn* dengan valuasi di atas 1 milyar USD. Oleh karena itu, dengan kapasitas dari sisi suplai yang cukup baik perlu dirumuskan upaya strategis bagaimana Indonesia membawa kepentingan nasional dengan mengutilisasi forum ASEAN *Digital Economic Framework Agreement* (DEFA).

## ISU KERANGKA KERJASAMA EKONOMI DIGITAL ASEAN DAN INDONESIA

**Kerangka dasar kerjasama ekonomi digital di ASEAN saat ini masih didasarkan pada ASEAN Digital Masterplan (ADM) 2025** dengan visi “*ASEAN as a leading digital community and economic bloc, powered by secure and transformative digital services, technologies and ecosystem*”. Beberapa dokumen berupa kebijakan dan peraturan dikeluarkan sebagai turunan dalam mendukung pencapaian visi dan misi ADM 2025.

**Digital Boracay yang mempertegas isu Synergy Towards a Sustainable Digital Future merupakan dokumen terbaru yang ditetapkan dalam Pertemuan Menteri Digital ASEAN Ketiga pada Februari 2023.** Dokumen tersebut mencantumkan inklusivitas digital di kawasan ASEAN untuk peningkatan produktivitas, penguatan kerjasama dalam mengurangi kesenjangan digital serta implementasi kebijakan yang berkelanjutan. Aspek keberlanjutan dikaitkan pula dengan implementasi kebijakan dengan kondisi pandemi Covid-19, program inovatif untuk meluaskan cakupan wilayah, serta mitigasi efek negatif perubahan iklim. Dari sisi pengguna termasuk stakeholder, transformasi digital yang berpusat pada manusia dipastikan keamanannya, terjamin dan relevan dengan kebutuhan pengguna akhir dan berbagai pemangku kepentingan. Payung hukum ASEAN terkait sistem *e-commerce* adalah *The ASEAN Agreement on Electronic Commerce (AAEC)*.

**Pada tingkat domestik, kebijakan di tingkat ASEAN diintegrasikan dalam kebijakan nasional dalam upaya mendukung transformasi digital.** Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2021 terkait persetujuan perdagangan melalui

sistem *e-commerce*. Implementasi kebijakan digital nasional dituangkan dalam *Roadmap Digital Indonesia (2021-2024)* dengan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan infrastruktur digital pemerintah, penguatan tata kelola data (termasuk *cross border data flow*) dan perluasan komunikasi publik termasuk *platform digital*. Pengembangan transformasi digital didasarkan pada empat pilar yaitu infrastruktur digital, ekonomi digital, *digital government* dan literasi digital. Pengembangan digital ekonomi difokuskan pada enam sektor prioritas yaitu pertanian, pendidikan, kedokteran, kesehatan, pariwisata, logistik. Sementara itu untuk memberikan perlindungan data pribadi, pada tahun 2022 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Perlindungan data pribadi diharapkan dapat mendorong kemajuan UMKM pemula dan integrasi digital.

### **BENCHMARK DAN LESSON LEARNED PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KERJASAMA DIGITAL**

Salah satu negara yang terbukti berhasil memanfaatkan digitalisasi untuk peningkatan perekonomian adalah Cina. Peningkatan perekonomian Cina menjadi bukti berhasilnya pemanfaatan digitalisasi. Kontribusi ekonomi digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Cina meningkat sebesar 39,8% pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2012 yang memiliki kontribusi lebih kecil yaitu sebesar 21,6%. Dampak positif pada perekonomian Cina merupakan keberhasilan dari beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah negara Cina yang berkolaborasi dengan pihak-pihak lainnya, salah satunya keterlibatan pihak swasta. Cina mengeluarkan kebijakan dan melakukan inovasi besar dalam pemanfaatan digital untuk perekonomian dengan melakukan reformasi pemanfaatan *e-*

*commerce* dan pemanfaatan solusi *fintech* untuk pembiayaan.

**Perkembangan industri digital di Cina membawa Cina menjadi *global leader* pada beberapa aspek digital** (Zhang dan Chen, 2019). Pada *e-commerce*, Cina mencatat lebih dari 40% transaksi global dan memiliki nilai persentase yang lebih tinggi dibandingkan dengan Amerika. Sementara itu pada *fintech*, perusahaan-perusahaan Cina tercatat berkontribusi lebih dari 70% total valuasi global. Keunggulan perkembangan digital Cina juga dapat dilihat dari dominasi beberapa aspek lainnya seperti dalam hal sistem pembayaran, perkembangan *e-commerce*, *cloud computing* dan ekspor *ICT*. Cina memiliki platform pembayaran seperti *Alipay* dan *WeChat Pay* yang tersedia di retail pada beberapa negara untuk memfasilitasi para wisatawan Cina ketika berkunjung ke negara lain. Cina juga memiliki salah satu *e-commerce* terbesar di dunia yaitu *Alibaba* yang juga mendukung perkembangan *e-commerce* di negara lain dengan cara berinvestasi pada perusahaan lokal seperti *Lazada* di Asia Tenggara dan *Airwallex* di Australia.

*The Alibaba Group* yang merupakan *e-commerce* terbesar di Cina melaksanakan program “*The Rural Taobao Program*” atau yang lebih dikenal dengan *Taobao Village*. Program tersebut dilaksanakan dengan tujuan membantu masyarakat pedesaan ataupun petani untuk mendapatkan akses internet yang lebih baik sehingga mereka dapat menjual hasil produk pertanian langsung ke konsumen yang diharapkan berdampak pada peningkatan pendapatan. Selain itu, para petani dan masyarakat juga diberikan pelatihan mengenai pemanfaatan dan penggunaan *e-commerce*, pelatihan kewirausahaan serta didukung dengan pembiayaan *fintech* dari *Alibaba Group* yang bernama *AntFinancial*. Program dari *Alibaba Group* ini sukses dilaksanakan dan *Taobao* menjadi salah satu *platform e-commerce* terbesar saat ini di Cina. Perkembangan *e-*

*commerce* di Cina juga sangat mendukung terciptanya inklusifitas. Hal ini dapat ditunjukkan dengan sebagian para pekerja ataupun pemilik toko-toko online *e-commerce* di Cina adalah perempuan dan penyandang disabilitas sehingga bisa memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses terhadap kesempatan kerja. Tercatat bahwa pada tahun 2020 total penjualan online dari *e-commerce* adalah sebesar 8,02 miliar USD dari 13,84 juta *online shop* yang terdaftar.

**Indonesia dan Cina sama-sama memiliki wilayah yang luas dan jumlah populasi yang tinggi sehingga Indonesia memiliki peluang mengimitasi kesuksesan Cina di bidang digital.** Indonesia dan Cina merupakan negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di masing-masing level, Cina di level global sedangkan Indonesia di level Asia Tenggara. Namun perkembangan *e-commerce* di Cina mulai lebih awal sehingga kesuksesan Cina dapat dijadikan *lesson learned* dan *benchmarking* untuk perkembangan digital ataupun *e-commerce* di Indonesia dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian. Menurut Yuliani (2021) Indonesia memiliki kekuatan dan kekurangan dalam bidang *e-commerce* untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Kekuatan Indonesia terletak pada pengguna internet yang semakin meningkat serta adanya beberapa startup yang berstatus *unicorn* namun hal tersebut belum didukung dengan infrastruktur telekomunikasi dan teknologi informasi yang memadai, jaminan keamanan *cyber* dan perlindungan data serta kualitas sumber daya manusia.

Kesuksesan transformasi di Cina tidak luput dari peranan pemerintah Cina dan keterlibatan pihak swasta dengan adanya sejumlah kebijakan, sarana prasarana dan pembangunan infrastruktur yang mendukung. Menurut Wong dan Wihardja (2022) terdapat tiga hal penting yang dapat direplikasi Indonesia dalam mewujudkan transformasi ekonomi digital, yaitu:

- 1) **Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mendasar dan lebih sederhana seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang sehat dan berpendidikan.** Kedua hal ini menjadi dasar untuk melakukan langkah dan transformasi selanjutnya yang lebih besar. Selain itu perlu didukung oleh pembangunan infrastruktur utama dalam sektor digital yaitu pemerataan ketersediaan jaringan internet hingga ke pelosok sehingga distribusi informasi, produk dan yang lainnya dapat memiliki mobilitas yang tinggi.
- 2) **Kolaborasi yang baik antara pihak pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan pihak swasta sebagai eksekutor.** Pemerintah dan swasta menjalankan peranannya masing-masing dalam kontribusi ekonomi digital. Arah kebijakan dari pemerintah perlu diikuti dengan baik oleh swasta. Studi kasus Alibaba di Cina menggambarkan hubungan yang erat antara pemerintah dengan swasta dan patut diaplikasikan di Indonesia. Pemerintah dan swasta dapat menjalin kemitraan dengan melaksanakan program berbasis digital seperti pelatihan dan pendampingan dalam bidang digital.
- 3) **Pembangunan karakter dengan memberikan motivasi pada wirausaha muda agar optimis dalam melaksanakan bisnis yang dimulai dari skala kecil.** Beberapa kasus di Indonesia saat ini sudah berkembang seperti adanya program petani milenial dari Kementerian Pertanian, dengan adanya program tersebut diharapkan para petani muda yang lebih terbuka akan informasi dan hal-hal baru bisa meningkatkan produksi pertanian dan peningkatan pendapatan. Selain itu beberapa *platform e-commerce* di Indonesia saat ini juga sudah berkembang dan mendukung untuk peningkatan ekonomi digital seperti *SayurBox*, *Shipper*, dan *Warung Pintar*. *E-commerce* tersebut

masing-masing telah memanfaatkan teknologi dan digital sebagai basis dari usaha yang dijalankan sehingga lebih efektif dan efisien.

**Sementara itu, dalam kerjasama di bidang digital, sebagai *benchmark* Singapura telah memiliki *Digital Economy Partnership Agreement (DEPA)* dengan Chile dan Selandia Baru.** Perjanjian DEPA antar ketiga negara tersebut merupakan perjanjian pertama yang menetapkan pendekatan digital dengan isu perdagangan internasional. Beberapa fitur kunci kerjasama ini antara lain adalah terkait dengan identitas digital untuk pengembangan keamanan, invoice digital agar transaksi perdagangan menjadi lebih singkat dan efisien, pengurangan penggunaan kertas untuk dokumen perdagangan dan pembayaran antar pelaku perdagangan melalui *fintech* dan *e-payments*. Perjanjian Kerjasama DEPA dirancang khusus yang terfokus beberapa hal yaitu kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), identitas digital, inklusi digital, dan perlindungan data konsumen.

**Dalam lingkup ASEAN, benchmark transformasi digital antara negara anggota ASEAN dapat menjadi *lesson learned* oleh negara anggota.** Filipina, Vietnam, Singapura, dan Laos memiliki kerangka regulasi paling komprehensif untuk *cybersecurity* sementara itu dalam perlindungan terhadap data non-pribadi, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam dapat menjadi *benchmark*.

## **HAMBATAN DAN TANTANGAN TRANSFORMASI DIGITAL**

Terlepas dari peluang transformasi digital yang diekstensifikasi dengan ASEAN DEFA, Indonesia khususnya masih dihadapkan pada tantangan spesifik secara internal terkait beberapa permasalahan yang bersifat struktural, mencakup:

**Pertama, Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan *digital divide within country* yang secara riil berdampak pada aspek inklusifitas dari transformasi digital.** Laporan *Beyond Unicorn* World Bank (2021) menunjukkan bahwa generasi muda, pengguna berpendidikan tinggi serta individu yang berasal dari keluarga dengan status sosioekonomi tinggi memiliki level adopsi teknologi yang lebih tinggi. Transformasi digital juga menunjukkan kondisi disparitas regional diperkuat dengan hasil pemetaan pengembangan ekonomi digital di 34 provinsi dan kota/kabupaten (East Ventures 2022). Indeks *East Ventures Digital Competitiveness Index (EV-DCI)* menunjukkan kinerja transformasi digital masih didominasi oleh provinsi di Pulau Jawa yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Banten, dan Jawa Timur. Disamping itu, Google, Temasek and Bain (2022) juga menemukan adanya kesenjangan digital yang terjadi pada kelompok masyarakat perkotaan dan perdesaan karena karakteristik *digital savvy* dengan daya beli yang lebih tinggi. Perlu dikonstruksikan program pemerintah mengenai mekanisme keterlibatan sektor privat karena *leverage* digital masih dianggap rendah untuk mengatasi *digital divide* antar wilayah, masyarakat perkotaan dan perdesaan, status sosioekonomi dan antar generasi serta UMKM dan Usaha Besar.

**Kedua, Indonesia juga masih menunjukkan kinerja yang *suboptimal* terkait dengan *digital readiness* dibandingkan dengan beberapa *peer countries* lainnya di kawasan ASEAN.** Berdasarkan pemetaan *ASEAN Digital Integration Index (ADII)*, dapat diidentifikasi bahwa Brunei, Malaysia, dan Singapura memiliki skor di atas rata-rata ASEAN seluruh dimensi, sedangkan Kamboja, Laos, dan Myanmar berada di bawah rata-rata ASEAN (Tham 2021). Ing dan Markus (2023) mengidentifikasi setidaknya terdapat beberapa kontributor disparitas *digital readiness* yakni kecepatan internet, penggunaan internet, teknologi produksi, dan kinerja perdagangan

barang terkait dengan ICT. Indonesia cenderung menunjukkan performa yang *sub optimal* pada indikator kecepatan internet dan perdagangan barang terkait dengan ICT. Menurut Speedtest (2022), kecepatan internet di Indonesia mencapai 21,95 Mbps lebih rendah dibandingkan Singapura yang mencapai 211,36 Mbps. Sementara itu, pertumbuhan kinerja ekspor dan impor barang dan jasa ICT Indonesia sangat kecil dibandingkan ASEAN *peer countries* yakni sebesar 3,30% untuk ekspor barang ICT di tahun 2020 dan 9,43% untuk untuk impor barang ICT di tahun 2020.

**Ketiga, ekonomi digital merupakan crosscutting issue dimana yurisdiksi regulasi yang ada melibatkan banyak Kementerian dan Lembaga.** Per Desember 2020, ekonomi digital Indonesia diatur oleh setidaknya 14 entitas pemerintah dibawah koordinasi antara entitas tersebut ada di bawah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Aprilianti dan Dina 2023). Oleh karena itu, koordinasi kebijakan perlu diperkuat. Beberapa area yang perlu mendapatkan prioritas dari sisi regulasi adalah data *privasi*, *cybersecurity*, dan *digital IP*.

Sementara itu, terdapat tantangan bersama (*common challenge*) utama di tingkat ASEAN yang perlu mendapatkan atensi dalam menghadapi ASEAN DEFA.

**Hambatan regulasi Intra-ASEAN dan kurangnya pendekatan harmonisasi.** Beberapa regulasi yang tidak koheren terkait dengan *cybersecurity*, data non-pribadi, dan data pribadi Regulasi lainnya yang divergen adalah lokalisasi data, subyek *de minimis provision*, kebijakan persaingan perpajakan, subsidi dan kebijakan industri, tata kelola pada teknologi baru seperti *AI* dan *fintech*. Secara rinci Filipina dan Singapura mengizinkan semua data, termasuk data pribadi, mengalir bebas melintasi perbatasan dengan persyaratan peraturan minimal. Sementara itu, Indonesia

dan Vietnam cenderung restriktif dengan sepenuhnya atau sebagian melarang aliran data lintas batas untuk alasan keamanan publik dan nasional. Malaysia dan Thailand mengizinkan aliran data lintas batas dengan persyaratan kepatuhan yang ketat.

**Negara anggota ASEAN memiliki kesenjangan dan kesiapan yang berbeda dalam menghadapi transformasi digital.** Sebagai ilustrasi, Filipina memiliki kerangka regulasi paling komprehensif untuk *cybersecurity* diikuti oleh Vietnam, Singapura, dan Laos. Sementara itu, dalam melindungi data non-pribadi, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam lebih maju dalam mencegah pembagian data non-pribadi.

### **STRATEGI MEMPERKUAT DIGITAL READINESS DALAM MENGHADAPI ASEAN DEFA**

Upaya dan dukungan kebijakan strategis yang perlu diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk memperkuat kesiapan digital dalam menghadapi ASEAN DEFA adalah sebagai berikut:

#### **1) Mendukung dan memfasilitasi terwujudnya transformasi digital yang inklusif.**

Kebijakan strategis pemerintah Indonesia yang dapat diambil dalam mendorong transformasi digital yang inklusif adalah sebagai berikut:

- a. Antar kementerian terkait harus saling bekerja dalam upaya kolektif terkait perspektif nasional dan pemahaman yang komprehensif mengenai definisi dan implikasi ekonomi digital bagi masyarakat Indonesia sehingga dapat mendorong kemajuan transformasi digital yang inklusif.
- b. Pemerintah diharapkan memfasilitasi para pelaku ekonomi, seperti UMKM dan sektor informal untuk terintegrasi ke dalam ekonomi digital. Fasilitas



pendampingan dan pelatihan dalam bentuk peningkatan keterampilan, *best practices* serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (*capacity building*) dibutuhkan bagi pelaku UMKM dan sektor informal. Diharapkan upaya ini dapat meningkatkan digital literasi, kemampuan dan keterampilan serta penggunaan teknologi digital untuk kegiatan produktif. Sehingga, mereka mendapatkan manfaat dari keikutsertaan dan integrasi dalam ekonomi digital.

- c. Pemerintah diharapkan melakukan upaya mendorong akses bantuan finansial bagi UMKM dan sektor informal, terutama agar mereka dapat memiliki **akses terhadap infrastruktur digital dan terintegrasi ke dalam ekonomi digital**. UMKM dan sektor informal seringkali terkendala dengan biaya yang mahal dalam kepemilikan alat teknologi digital serta akses infrastruktur digital. Dengan bantuan akses finansial diharapkan UMKM dan sektor informal dapat menggunakan teknologi digital dengan biaya yang terjangkau.
  - d. Pemerintah perlu mengatasi kesenjangan antar wilayah di Indonesia dalam hal akses layanan digital dan penyediaan infrastruktur fisik maupun infrastruktur digital. Selain itu, Pemerintah perlu menjamin kualitas infrastruktur digital yang baik antar wilayah, baik perkotaan dan pedesaan. Dengan begitu, pemerataan *digital connectivity* dapat dicapai, sehingga berdampak bagi akselerasi ekonomi digital di Indonesia.
- 2) **Memberikan prioritas dan memfasilitasi pelaku usaha dan sektor ekonomi dalam melakukan inovasi digital teknologi yang memberikan manfaat dan membantu aktivitas manusia.**

- a. Pemerintah perlu mendorong pengembangan inovasi digital teknologi

yang tepat guna dan *human-centric*. Transformasi ekonomi digital harus didasarkan pada perubahan pola pikir dan pandangan masyarakat tentang konsep teknologi sebagai alat yang dapat membantu manusia, bukan menggantikannya. Kemajuan teknologi seharusnya dapat membantu aktivitas dan memberikan manfaat bagi manusia. Inovasi digital harus menekankan pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk menciptakan lapangan kerja.

- b. Pemerintah harus memberikan prioritas pada pengembangan SDM, agar tenaga kerja dan calon tenaga kerja dapat meningkatkan kapasitas dan keterampilannya, serta ikut mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Upaya strategis dalam mempersiapkan SDM Indonesia adalah dengan menyediakan sistem pendidikan yang tepat dalam memanfaatkan dan mengendalikan teknologi. Diharapkan tenaga kerja dan calon tenaga kerja dapat memiliki kompetensi dan mampu bersaing baik di dalam negeri dan di tingkat ASEAN.

- 3) **Memfokuskan pada peraturan pemerintah dalam rangka penyempurnaan undang-undang keamanan siber, privasi data, dan peraturan persaingan.** Strategi ini sebagai upaya mengatasi kesenjangan dalam kerangka peraturan dan kurangnya pendekatan harmonis terhadap ekonomi digital antar-negara ASEAN. Untuk itu, Pemerintah Indonesia perlu fokus pada upaya strategis sebagai berikut: (i) mempromosikan penerapan standar keamanan siber, keamanan data, dan kebijakan privasi yang konsisten di dalam negeri; (ii) mendorong dunia usaha untuk bersaing secara sehat dan mengembangkan ekonomi digital. Undang-undang persaingan harus dipatuhi untuk menjaga pasar tetap dinamis dan inovatif.

Pemerintah juga harus mengatur, mengawasi, dan mencegah dominasi atau monopoli para pemain teknologi besar dalam pasar digital. Peraturan yang berlaku harus selalu berkembang dan fleksibel terhadap transformasi digital yang dinamis.

- 4) **Melakukan pemetaan kesiapan digital Indonesia.** Pemetaan ini juga ditujukan untuk dapat memberikan elaborasi mengenai karakteristik, posisi kekuatan dan tantangan kesiapan digital Indonesia serta melakukan studi komparasi pada level regional ASEAN. Pemetaan ini dapat digunakan sebagai acuan bagi posisi runding Indonesia pada kerjasama ekonomi digital di level ASEAN. Diharapkan pengambilan keputusan dan kebijakan kerjasama ini dapat mengedepankan prinsip kehati-hatian serta memprioritaskan posisi dan kepentingan Indonesia, dalam upaya mengurangi kesenjangan kesiapan digital, baik di level nasional dan level ASEAN.

#### **STRATEGI DALAM RANGKA KEKETUAAN INDONESIA DI ASEAN**

Langkah dan upaya strategis yang dapat ditempuh Pemerintah Indonesia dalam ruang lingkup Keketuaan ASEAN untuk memperkuat *digital readiness* dalam menghadapi ASEAN DEFA adalah sebagai berikut:

- 1) **Mengkonstruksikan kerangka peraturan yang koheren untuk ekonomi digital sebagai upaya kolektif prioritas yang harus dilakukan untuk mempromosikan transparansi dalam desain dan implementasi peraturan digital intra ASEAN.** Upaya untuk membangun kepercayaan dalam tata kelola dan manajemen data sebagai prasyarat untuk pasar digital ASEAN yang terintegrasi dapat dilakukan dengan: (i) menetapkan undang-undang perlindungan data pribadi di negara-negara ASEAN yang mengikuti praktik peraturan yang baik dan

mempromosikan interoperabilitas; (ii) mempercepat penerapan langkah-langkah keamanan data yang koheren dan persyaratan *cybersecurity*; (iii) peningkatan kapasitas untuk memastikan pemerataan keuntungan dari aliran data; (iv) memanfaatkan insitusi di ASEAN, termasuk *ASEAN Network Security Action Council*, *WG on Digital Data Governance*, dan *ASEAN Coordinating Committee on Electronic Commerce*; (v) mengoptimalkan Repositori Perdagangan ASEAN harus diperluas ke area kebijakan yang memengaruhi ekonomi digital.

- 2) **Perlunya pemahaman yang sama pada lingkup ASEAN mengenai apa itu teknologi tepat guna (*appropriate technology*) sebagai upaya untuk membentuk ASEAN Digital Community di masa depan.** Dengan persepektif ini, teknologi digital dapat memberikan manfaat dan membantu aktivitas produktif masyarakat, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, juga diperlukan **pemahaman yang sama pada tingkat ASEAN mengenai strategi dalam memanfaatkan digital transformation untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.** Salah satu upaya bersama pada tingkat ASEAN yang dapat ditempuh adalah meningkatkan digital literasi dalam lingkup ASEAN serta mengakselerasi pembangunan infrastruktur digital.
- 3) **Perlu pemetaan elemen kunci dan prioritas dari digital ekonomi yang akan diadopsi dalam ASEAN DEFA.** Pemetaan ini didasari dari kesiapan digital dari negara-negara ASEAN, mengedepankan aspek kerja sama dan komitmen bersama antar negara member ASEAN. Dalam melakukan pemetaan ini juga perlu dilakukan studi dan review dalam penerapan DEPA yang telah dilakukan oleh negara-negara lain.

- 4) **Perlu upaya bersama untuk membangun *enabling ecosystem* dalam rangka meningkatkan daya tarik *business group* di ASEAN untuk melakukan diversifikasi bisnisnya pada digital teknologi.** Perlu adanya basis produksi di Negara ASEAN yang mendukung pembangunan infrastruktur digital yang kuat di wilayah ASEAN seperti pembangunan semikonduktor dan penerapan *new frontier technology* seperti AI. Sehingga, dapat menjadi daya tarik investasi pada sektor ICT dan industri *Medium-High Tech*. Untuk itu, perlu ada studi dan pendalaman lebih lanjut mengenai upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan iklim bisnis pada digital teknologi di *member of ASEAN*.
- 5) **Mendorong akselerasi akses *microfinancing* di ASEAN sehingga mampu P2P kepada *small enterprises*** agar mampu mendapatkan akses terhadap infrastruktur digital dan terintegrasi ke dalam ekonomi digital (inklusif).
- 6) **Diperlukan kesepakatan dan kerjasama bersama berupa program akselerasi transformasi digital yang inklusif dalam upaya mengurangi kesenjangan dalam kesiapan digital antar negara ASEAN.** Kerjasama yang diusulkan dapat berupa fasilitasi dari negara ASEAN yang lebih maju di sisi kesiapan digital agar dapat membantu negara ASEAN lain dalam peningkatan akses infrastruktur digital dan mendorong adopsi teknologi digital.

## DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN. 2021. ASEAN Digital Masterplan 2025. <https://asean.org>. Diunduh 28 Februari 2023.
- ASEAN. 2023. Boracay Digital Declaration. <https://asean.org>. Diunduh 12 Maret 2023.
- East Ventures Digital Competitiveness Index. Menuju Era Keemasan Digital Indonesia: Pemetaan Daya Saing Digital 34 Provinsi dan 25 Kota di Indonesia. East Ventures, Jakarta.
- Google, Temasek and Bain (2022). e-Conomy SEA 2022. Through the waves, towards a sea of opportunity. Google, Singapore.
- Ing. L.Y dan I. Markus. 2023. ASEAN Digital Community 2040. ERIA Policy Brief, Jakarta.
- Nasution, I.M. 2023. *MCI's view on: ASEAN Digital Economy Framework Agreement. TRADE Policy Advisory Group Leveraging ASEAN Chairmanship: Formulating Priority for SEAN Deliverables*. Jakarta, 23 February 2023. Center of International Affairs Ministry of Communications and Informatics.
- Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan Asean Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 234. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Quallen, Brooklyn. 2021, April. E-Commerce Can End Rural Poverty in China. <https://borgenproject.org/end-rural-poverty-in-china/>.
- Speedtest 2022, Speedtest Global Index – Global Median Speeds, Mobile and Fixed Broadband Data. <https://www.speedtest.net/globalindex#mobile> (accessed 12 September 2022)
- Spence, Michael. 2021. Government and economics in the digital economy. *Journal of Government and Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.jge.2021.100020>.
- Tham S.Y. 2021. Digital Commitments in ASEAN's Free Trade Agreements. ISEAS, Singapore.
- Wihardja, M.M., *ASEAN's Digital Economy: Implementation Strategy for ASEAN Members. "Leveraging ASEAN Chairmanship: Formulating Priority for ASEAN Deliverables"*. Trade Policy Advisory Group. Ministry of Trade, February 23, 2023.
- Wong, Brian A. Wihardja, Maria Monica. 2022, Februari. Apa yang dapat dipelajari Indonesia dari transformasi ekonomi

digital di China?. World Bank Blogs.  
<https://blogs.worldbank.org/id/eastasiapacific/what-can-indonesia-learn-from-china-digital-economic-transformation>.

World Bank. 2021. Beyond Unicorns: Harnessing Digital Technologies for Inclusion in Indonesia. World Bank, Jakarta. East Ventures. 2022.

Yuliani, Dinda. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia dan China dalam Bidang E-Commerce. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.

Zhang W, Zhao S, Wan X, Yao Y. 2021. Study on the effect of digital economy on highquality economic development in China. PLoS ONE 16(9): e0257365.  
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0257365>

Zhang, Longmei. Chen, Selly. 2019. China's Digital Economy: Opportunities and Riks. International Monetary Fund WP/19/16 Pages 24.  
ISBN/ISSN:9781484389706/1018-5941.

**TRADE POLICY ADVISORY GROUP****COORDINATOR**

1. Dr. Kasan
2. Dr. Lili Yan Ing

**KEY EXPERTS**

1. Brian Wong
2. Ichwan Nasution
3. Maria Monica Wihardja
4. Aladdin Rillo

**CONTRIBUTORS**

1. Dr. Widyastutik
2. Dr. Eisha Rachbini

**POLICY/RESEARCH TEAMS****ITAPS-IPB**

1. Siti Riska Ulfah Hidayanti, SE, M.Si
2. Syarifah Amaliah, SE, M.App.Ec
3. Dewi Setyawati, SP, M.Si
4. Sri Retno Wahyu Nugraheni, SE, M.Si

**BKPERDAG**

1. Iskandar Panjaitan
2. Immanuel Lingga
3. Aditya Paramita Alhayat
4. Sefiani Rayadiani
5. Septika Tri Ardiyanti
6. Titis Kusuma Lestari
7. Niki Barendra Sari
8. Choirin Nisaa
9. Farida Rahmawati
10. Steven R. Ingot
11. Siti Mir'atul Khasanah
12. Annisa Aulani Kusnadi

**ERIA**

1. Dr. Doan Ha
2. Yessy Vadilla
3. Livia Nazara
4. Ivana Markus

**PUBLICATION TEAM**

1. Primakrisna Trisnoputri
2. Athifah Syauqin Aryndani
3. Andrika Sembiring
4. Erwin Abdiwijaya
5. Dwi Yulianto

**SECRETARIAT TEAM**

1. Sri Astuti
2. Emil Fadri
3. Megawati
4. Sri Rejeki Hutapea
5. Maulida Lestari
6. Dini Ramadhani
7. Achmad Sigit Santoso
8. Iqbal Musyaffa
9. Maria Rosari
10. Putri Khairani
11. Hasna Fairuz
12. Refina Raisa Alna
13. Areta Citamaja
14. Sabrina Pratiwi
15. Fitriana W.R.
16. Lely Supriati
17. Catherin Nur Safitri

# POLICY BRIEF

## *Leveraging ASEAN Chairmanship: Formulating Priority for ASEAN Deliverables*

### **EXECUTIVE SUMMARY**

*Holding ASEAN Chairmanship 2023, with the theme “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”, Indonesia focuses on one of priority issues in the ASEAN economic sector, i.e., digital economy. Digital transformation in ASEAN aims to strengthen the regional economic growth and to become epicentrum of growth. The main drivers of ASEAN digital transformation include some factors, such as strong fundamental ASEAN economic growth, large number of populations, as well as its share of young generation. In addition, fast growing and large number of internet users also support ASEAN digital transformation.*

*The urgency of promoting digital transformation has initiated several agreements related to digital economy within ASEAN members since 2000. These agreements include ASEAN Agreement on Electronic Commerce, 2018; e-ASEAN Framework Agreement, 2000; ASEAN Digital Master Plan 2025 Bandar Seri Begawan Roadmap (BSBR), 2021; dan Boracay Digital Declaration, 2023.*

*Indonesia, in the ASEAN Chairmanship, also realizes that ASEAN has potentials to accelerate digital transformation as drivers for economic growth. As a country member, Indonesia is acknowledged to become one of the fastest growing digital economies in the region as it owns huge potential and digital capacity, such as population size, production capacity, and human resources. With the rapid growth of digitalization, Indonesia has the opportunities to become a leader among ASEAN countries, as the trend setter and standard setter which ASEAN members might follow to accelerate digital transformation. Therefore, it is*

*necessary to formulate strategic efforts on how Indonesia will carry on the national interests into the ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA).*

*To strengthen Indonesia's digital readiness in preparing the ASEAN DEFA, Government of Indonesia needs to carry out strategic policies and supports, as follows: 1) Supporting inclusive digital transformation; 2) Prioritizing and facilitating business actors and economic sectors in the adoption of digital technology and promoting innovations as it will provide benefits and assist their economic activities; (3) Focusing on government regulations to improve cybersecurity laws, data privacy, and competition regulations. (4) Mapping Indonesia's digital readiness.*

*In addition, Government of Indonesia should take strategic steps and efforts to strengthen digital readiness, in the context of the ASEAN Chairmanship and the ASEAN DEFA forum, such as: 1) Constructing a coherent regulatory framework for the digital economy as a priority collective effort that must be carried out to promote transparency in the design and implementation of intra-ASEAN digital regulations; 2) Promoting the same understanding of appropriate technology within ASEAN as a fundamental effort for the establishment of ASEAN Digital Community in the future; 3) Mapping the key elements and priorities for digital economy that will be adopted in ASEAN DEFA; 4) Strengthening joint efforts for enabling ecosystem to attract business groups and investors in ASEAN to diversify their business in digital technology; 5) Promoting the acceleration of microfinancing access for small enterprises in ASEAN, e.g. P2P financing for small enterprises; 6) Supporting mutual agreement and cooperation to accelerate inclusive digital transformation as efforts to reduce the gap in digital readiness among ASEAN countries.*

## **BACKGROUND**

ASEAN has the opportunity to accelerate and be at the forefront of the global digital economy. The main drivers of ASEAN's digital transformation include tremendous potential with strong economic fundamentals such as a large and attractive market size of 670 million people, a sizeable population of young people who are tech-savvy and increasing internet penetration. The high number of ASEAN internet users reaching 460 million old internet users and 100 million new internet users during the Covid-19 pandemic also supports ASEAN's digital transformation. If seen further, as many as 88% of ASEAN internet users are smartphone users and have been active in making digital payments which are expected to increase to 1.1 billion USD in 2025. Meanwhile, for Indonesia, internet users have increased significantly from time to time and the number of internet users would reach 210 million people in 2022 with the rise of internet penetration rate reaching 77.02% in 2021-2022. The potential for the development of the digital sector in Indonesia is also shown by the sufficient number of mobile devices connected to the internet, as many as 370.1 million people in 2022 and more than 210 million Indonesians connected to the internet in 2021-2022.

**ASEAN's enormous digital potential is supported by the serious commitment of the government within ASEAN which is represented by digital cooperation agreements since the early 2000s.** Several digital related agreements which have been implemented in ASEAN include ASEAN Agreement on Electronic Commerce in 2018; the e-ASEAN Framework Agreement was agreed in 2000; the ASEAN Digital Master Plan 2025 Bandar Seri Begawan Roadmap (BSBR) in 2021 and the Boracay Digital Declaration in 2023.

**ASEAN, including Indonesia, realizes that digital transformation is a source of economic growth for Indonesia and ASEAN.** The value of Indonesia's digital economy in 2021 reached 70 billion USD and is predicted to continue to increase and reach a value of 146 billion USD in 2025 and 315.5 billion USD in

2030. The scale of digitalization in ASEAN is expected to drive economic development, especially in e-commerce, online media, financial services and ride-hailing in order to record solid growth in the future.

**Indonesia has the potential to be a trend setter in the development of digital transformation in ASEAN.** At the ASEAN level, Indonesia has a large market size and production capacity in terms of human resources. Despite Singapore has been recognized as the leader in digital agreements and institutional aspects, Indonesia has the opportunity to become a leader in ASEAN so that it becomes a trend and standard setter that other ASEAN countries. This promising goal can be realized because of Indonesia's large market will attract local startups with unicorn and decacorn status to explore the market in ASEAN. Furthermore, in order to realize this opportunity, it is crucial to build the Silicon Valley of ASEAN startups in Indonesia so that Indonesia becomes the basis for the development of the digital economy in ASEAN. Currently, Indonesia has the largest number of startups in the ASEAN region with 2,345 startups by 2022 (Startupranking 2022). Moreover, several Indonesian startups have reached decacorn and unicorn status valuing over 10 billion USD and 1 billion USD, respectively. Therefore, with sufficient capacity from the supply side, it is necessary for Indonesia, particularly Ministry of Trade, to formulate strategic policies on how Indonesia will benefit from the ASEAN forum on Digital Economic Framework Agreement (DEFA) in accordance to its own national interests.

### **ISSUES OF THE ASEAN AND INDONESIA DIGITAL ECONOMIC COOPERATION FRAMEWORK**

**The basic framework for digital economic cooperation in ASEAN is currently still based on the ASEAN Digital Masterplan (ADM) 2025** with the vision "ASEAN as a leading digital community and economic block,

powered by secure and transformative digital services, technologies and ecosystem". Several documents in the form of policies and regulations were issued as supplementary in supporting the achievement of ADM's 2025 vision and mission.

**Boracay Digital Declaration, which emphasizes the issue of Synergy Towards a Sustainable Digital Future, is the latest document to be stipulated at the Third ASEAN Digital Ministerial Meeting in February 2023.** The document includes digital inclusiveness in the ASEAN region to increase productivity, strengthen cooperation in reducing the digital divide and implement sustainable policies. The aspect of sustainability is also associated with implementing policies under the conditions of the Covid-19 pandemic, innovative programs to expand area coverage, and mitigating the negative effects of climate change. From the stakeholder side, human-centered digital transformation is guaranteed to be safe and relevant to the needs of end users and various stakeholders. The ASEAN legal umbrella related to the e-commerce system is The ASEAN Agreement on Electronic Commerce (AAEC).

**At the domestic level, the ASEAN digital declaration are aligned with the existing policies supporting digital transformation.** The Indonesian government passed Law Number 4 of 2021 regarding trade agreements through the e-commerce system. The implementation of the national digital policy is outlined in the Indonesian Digital Roadmap (2021-2024) with a focus on accelerating infrastructure development, improving government digital infrastructure, strengthening data governance (including cross border data flow) and expanding public communications including digital platforms. The development of digital transformation in Indonesia is based on four pillars, namely digital infrastructure, digital

economy, digital government and digital literacy. Specifically, the digital economy development is focused on six priority sectors, namely agriculture, education, medicine, health, tourism, logistics. In order to provide personal data protection, the Indonesian government issued Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection which is expected to facilitate the growth of the digital MSMEs as well as the digital integration.

### **BENCHMARK AND LESSON LEARNED FROM ECONOMIC DEVELOPMENT AND DIGITAL COOPERATION**

**A country that has proven successful in utilizing digitalization to improve its economy is China.** The improvement in China's economy is evidence of the successful use of digitalization. The digital economy's contribution to China's Gross Domestic Product (GDP) increased by 39.8% in 2021 compared to 2012 with a contribution of 21.6%. The positive impact on the Chinese economy is contributed by the success of several policies issued by the Chinese state government involving the private sector. China issued policies and carried out major innovations in the use of digital for the economy by reforming the use of e-commerce and utilizing fintech solutions for financing.

**The development of the digital industry in China has brought China to become a global leader in several digital aspects** (Zhang and Chen, 2019). In e-commerce, China accounts for more than 40% of global transactions and has a higher percentage value compared to the United States. Meanwhile in fintech, Chinese companies are recorded as contributing to more than 70% of the total global valuation. The advantages of China's digital development can also be seen from the dominance of several other aspects such as the payment systems, e-commerce developments, cloud computing and ICT exports. China has payment platforms such as Alipay and WeChat Pay which are available

at retail in several countries to facilitate Chinese tourists when visiting other countries. China also has one of the largest e-commerce sites in the world, namely Alibaba, which also supports the development of e-commerce in other countries by investing in local startups such as Lazada in Southeast Asia and Airwallex in Australia.

**The Alibaba Group, which is the largest e-commerce in China, has implemented “The Rural Taobao Program” or better known as Taobao Village.** The program was implemented with the aim of helping rural communities or farmers to get better internet access so they can sell agricultural products directly to consumers which is expected to increase rural income. Besides, rural farmers and the community are also given training on the utilization and use of e-commerce and entrepreneurship. The program is also supported by fintech financing from Alibaba Group called AntFinancial. Currently, Taobao became one of the largest e-commerce platforms in China. It is noted that in 2020 total online sales from e-commerce amounted to 8.02 billion USD from 13.84 million registered online shops. The development of e-commerce in China also supports inclusiveness. This condition can be shown by the fact that some of the workers or owners of online e-commerce shops in China are women and people with disabilities so they can have the same rights to get access to job opportunities.

**Indonesia and China both have large territories and population so that Indonesia has the opportunity to emulate China's success in the digital field.** Indonesia and China are countries with the largest number of internet users at South East Asia and global level, respectively. However, the development of e-commerce in China started earlier so that China's success can be used as lessons learned and benchmarking for digital or e-commerce developments in Indonesia in order to support economic development. According to Yuliani



(2021), Indonesia's strength in e-commerce development lies in its increasing internet users and the presence of several startups with unicorn status. However, this has not been supported by adequate telecommunication and information technology infrastructure, guaranteed cyber security and data protection and quality human resources.

The success of the digital transformation in China is inseparable from the role of the Chinese government and the involvement of the private sector in policies, infrastructure and supporting infrastructure development. According to Wong and Wihardja (2022), there are three important aspects that Indonesia can replicate in realizing digital economic transformation, namely:

- 1) The government improves human capital using health and education policies.** These two aspects form the fundamentals for digital transformation. In addition to that, it also needs to be supported by the development of the digital infrastructure, namely the distribution of internet network availability to remote areas so that the distribution of information and products that can be easily accessed.
- 2) Good collaboration between the government as policy makers and the private sector as executors.** The government and the private sector carry out their respective roles in contributing to the digital economy. The policy direction from the government needs to be followed properly by the private sector. Alibaba's case study in China illustrates the close relationship between the government and the private sector and should be applied in Indonesia. The government and the private sector can establish partnerships by implementing digital-based programs such as training and assistance in the digital field.
- 3) Character building by motivating young entrepreneurs to be optimistic in carrying out businesses that start on a small scale.**

Similar initiatives have also emerged in Indonesia such as the millennial farmer program from the Ministry of Agriculture. It is expected that young farmers who are more open to information and new innovations can increase agricultural production and income. Besides, several e-commerce platforms in Indonesia are currently developing and supporting digital economy development, such as SayurBox, Shipper, and Warung Pintar. Each of these e-commerce has utilized technology and digital platform as the basis of the business being carried out so that it is more effective and efficient.

**Meanwhile, Indonesia can also learn from Singapore as benchmark in terms of digital economic cooperation. Currently, Singapore has Digital Economy Partnership Agreement (DEPA) with Chile and New Zealand.** The DEPA agreement between the three countries is the first agreement that establishes a digital approach to international trade. Some of the key features of this collaboration include digital identity for security development, digital invoices to make trade transactions shorter and more efficient, reducing the use of paper for trade documents and payments between trade actors through fintech and e-payments. The DEPA Cooperation Agreement is specifically designed to focus on several aspects, namely artificial intelligence (AI), digital identity, digital inclusion, and consumer data protection.

**Within the scope of ASEAN, digital transformation benchmarks between ASEAN member countries can be lessons learned by member countries.** The Philippines, Vietnam, Singapore and Laos have the most comprehensive regulatory frameworks for cybersecurity while in the protection of non-personal data, Indonesia, Malaysia, the Philippines, Thailand and Vietnam can serve as benchmarks.

## **BARRIERS AND CHALLENGES TO DIGITAL TRANSFORMATION**

Apart from the digital transformation opportunities that are being amplified with ASEAN DEFA, Indonesia in particular is still faced with specific internal challenges related to several structural issues, including:

**First, Indonesia is facing the problem of digital divide within the country which has a real impact on the inclusiveness aspect of digital transformation.** The Beyond Unicorn report by the World Bank (2021) shows that the younger generation, highly educated users and individuals from families with high socioeconomic status have a higher level of technology adoption. Digital transformation also shows that regional disparity has occurred. This has been validated by the results of the digital economy development mapping in 34 provinces and cities/districts conducted by East Ventures. The East Ventures Digital Competitiveness Index (EV-DCI) shows that digital transformation performance is still dominated by provinces on Java Island, namely DKI Jakarta, West Java, Yogyakarta, Banten and East Java (East Ventures, 2022). Apart from that, Google, Temasek and Bain (2022) also found that there is a digital divide in urban and rural groups as the urban households are characterized to be more digital savvy with higher purchasing power. Hence, in order to solve this internal challenges, private sector involvement is needed. The government program is still considered insufficient to overcome all types of the digital divide between regions, urban and rural communities, socioeconomic status and between generations as well as MSMEs and Large Enterprises.

**Second, Indonesia is also still showing suboptimal performance in relation to the digital readiness compared to several other peer countries in the ASEAN region.** Based on the the ASEAN Digital Integration Index (ADII), it can be identified that Brunei, Malaysia and Singapore have scores above the

ASEAN average for all dimensions, while Cambodia, Laos and Myanmar are below the ASEAN average (Tham, 2021). Ing and Markus (2023) identified at least several contributors to the digital readiness disparity, namely internet speed, internet use, production technology, and the performance of trade in goods related to ICT. Indonesia tends to show sub-optimal performance on internet speed indicators and trade in goods related to ICT. According to Speedtest (2022), internet speed in Indonesia reaches 21.95 Mbps, lower than Singapore which reaches 211.36 Mbps. Meanwhile, the performance growth in Indonesia's exports and imports of ICT goods and services is very small compared to ASEAN peer countries, namely 3.30% for ICT goods exports in 2020 and 9.43% for ICT goods imports in 2020.

**Third, the digital economy is a cross-cutting issue where the existing regulatory jurisdictions involve many Ministries and Institutions.** As of December 2020, Indonesia's digital economy is regulated by at least 14 government entities under coordination of the National Development Planning Agency (Bappenas) and the Coordinating Ministry for Economic Affairs (Aprilianti and Dina, 2023). Therefore, policy coordination needs to be strengthened. Some areas that need priority from a regulatory perspective are data privacy, cybersecurity, and digital IP.

Meanwhile, there are major common challenges at the ASEAN level that need to be overcome in facing ASEAN DEFA.

**Intra-ASEAN regulatory bottlenecks and lack of a harmonized approach.** Some regulations are incoherent in terms of cybersecurity, non-personal data, and personal data. Other regulations that are diverging include data localization, subject de minimis provision, tax competition policies, subsidies and industrial policies, governance in new technologies such as AI and fintech. Specifically, the Philippines and Singapore allow all data, including personal data, to flow

freely across borders with minimal regulatory requirements. Meanwhile, Indonesia and Vietnam tend to be restrictive by completely or partially prohibiting cross-border data flows for reasons of public and national security. Malaysia and Thailand allow cross-border data flows with strict compliance requirements.

**ASEAN member countries have different gaps and readiness in facing digital transformation.** For instance, the Philippines has the most comprehensive regulatory framework for cybersecurity followed by Vietnam, Singapore and Laos. Meanwhile, in protecting non-personal data, Indonesia, Malaysia, the Philippines, Thailand and Vietnam are more advanced in preventing the sharing of non-personal data.

### **STRATEGY TO STRENGTHEN DIGITAL READINESS IN FACING ASEAN DEFA**

Efforts and strategic policy support that need to be taken by the Government of Indonesia to strengthen digital readiness in facing ASEAN DEFA are as follows:

**1) Support and facilitate the realization of inclusive digital transformation.** The strategic policies of the Indonesian government that can be taken in encouraging an inclusive digital transformation are as follows:

- a. Relevant ministries must work together in collective efforts regarding national perspectives and a comprehensive understanding of the definition and implications of the digital economy for the Indonesian society so that they can promote progress in an inclusive digital transformation.
- b. The government is expected to facilitate economic actors, such as MSMEs and the informal sector to be integrated into the digital economy. Assistance and training

facilities in the form of skill improvement, best practices and human resource capacity building (capacity building) are needed for SMEs and the informal sector. It is hoped that this effort can increase digital literacy, abilities and skills as well as the use of digital technology for productive activities. Thus, they benefit from participation and integration in the digital economy.

- c. The government is expected to make efforts to encourage access to financial assistance for MSMEs and the informal sector, so that they can access digital infrastructure and be integrated into the digital economy. MSMEs and the informal sector are often constrained by the high costs of owning digital technology tools and accessing digital infrastructure. With the help of financial access, it is hoped that MSMEs and the informal sector can use digital technology at an affordable cost.
  - d. The government needs to overcome disparities between regions in Indonesia in terms of access to digital services and provision of physical and digital infrastructure. In addition, the Government needs to guarantee good quality digital infrastructure between regions, both urban and rural. In this way, equal distribution of digital connectivity can be achieved, which will have an impact on accelerating the digital economy in Indonesia.
- 2) Prioritizing and facilitating business actors and the economic sector in carrying out digital technology innovations that provide benefits and assist human activities.**
- a. The government needs to encourage the development of appropriate and human-centric digital technology and innovations. Digital economic

transformation must be based on changes in people's mindsets and views on the concept of technology as a tool that can help humans, not replace it. Technological advances should be able to help activities and provide benefits for humans. Digital innovation must emphasize the development of human resources (HR) to create jobs.

- b. The government must give priority to human resource development, so that workers and prospective workers can increase their capacity and skills, and participate in digital economy. A strategic effort in preparing Indonesian human resources is to provide an appropriate education system in utilizing and controlling technology. It is hoped that workers and prospective workers will have competence and be able to compete both at the domestic and ASEAN levels.
- 3) **Focus on government regulations in order to improve cybersecurity laws, data privacy, and competition regulations.** This strategy is an effort to address gaps in the regulatory framework and the lack of a harmonized approach to the digital economy among ASEAN countries. For this reason, the Government of Indonesia needs to focus on the following strategic efforts: (i) promoting the application of consistent cyber security standards, data security and privacy policies in the country; (ii) encouraging the business world to compete fairly and develop the digital economy. Competition laws must be complied with to keep the market dynamic and innovative. The government must also regulate, supervise, and prevent the domination or monopoly of big technology players in the digital market. Applicable regulations must always evolve and be flexible to dynamic digital transformation.

4) **Mapping Indonesia's digital readiness.**

This mapping is also intended to be able to provide elaboration on the characteristics, strength positions and challenges of Indonesia's digital readiness as well as conduct comparative studies at the ASEAN regional level. This mapping can be used as a reference for Indonesia's negotiating position on digital economic cooperation at the ASEAN level. With this mapping, it is expected that this decision-making and cooperation policy can prioritize Indonesia's position and interests, in an effort to reduce the digital readiness gap, both at the national level and the ASEAN level.

**STRATEGY IN THE CONTEXT OF INDONESIA'S CHAIRMANSHIP IN ASEAN**

Strategic steps and efforts that can be taken by the Government of Indonesia within the role of the ASEAN Chairmanship to strengthen digital readiness in dealing with ASEAN DEFA are as follows:

- 1) **Constructing a coherent regulatory framework for the digital economy is a priority collective effort that must be undertaken to promote transparency in the design and implementation of intra-ASEAN digital regulations.** Efforts to build trust in data governance and management as a prerequisite for an integrated ASEAN digital market can be carried out by: (i) establishing personal data protection laws in ASEAN countries that follow good regulatory practice and promote interoperability; (ii) expedite implementation of coherent data security measures and cybersecurity requirements; (iii) capacity building to ensure equitable distribution of benefits from data flows; (iv) utilize institutions in ASEAN, including the ASEAN Network Security Action Council, the WG on Digital Data Governance, and the

- ASEAN Coordinating Committee on Electronic Commerce; (v) optimizing the ASEAN Trade Repository should extend to policy areas affecting the digital economy.
- 2) **The need for a common understanding within ASEAN regarding what appropriate technology is as an effort to form an ASEAN Digital Community in the future.** With this perspective, digital technology can provide benefits and help people's productive activities, so as to drive economic growth. Therefore, it is also necessary to have **the same understanding at the ASEAN level regarding strategies for utilizing digital transformation to drive economic growth.** One of the joint efforts at the ASEAN level that can be pursued is increasing digital literacy within ASEAN and accelerating the development of digital infrastructure.
  - 3) **It is necessary to map the key elements and priorities of the digital economy that will be adopted in ASEAN DEFA.** This mapping is based on the digital readiness of ASEAN countries, prioritizing aspects of cooperation and joint commitment among ASEAN member countries. It is also necessary to undertake studies and reviews on the implementation of DEPA that have been assessed by other countries.
  - 4) **Joint efforts are needed to build an enabling ecosystem in order to increase the attractiveness of business groups in ASEAN to diversify their business in digital technology.** There is a need for a production base in ASEAN countries that supports the development of strong digital infrastructure in the ASEAN region such as the development of semiconductors and the application of new frontier technologies such as AI. Thus, it can be an attractive investment in the ICT sector and the Medium-High Tech industry. For this reason, there is a need for further study and deepening regarding the efforts that need to be made in order to improve the business

climate in digital technology in the members of ASEAN.

- 5) **Encouraging accelerated access to microfinance in ASEAN and promoting P2P lending for MSMEs** so that they will be able to gain access to digital infrastructure and be integrated into the digital economy (inclusive).
- 6) Agreement and joint cooperation are needed in the form of an inclusive digital transformation acceleration program in an effort to reduce the gap in digital readiness among ASEAN countries. The proposed cooperation could be in the form of facilitation from ASEAN countries that are more advanced in terms of digital readiness so that they can assist other ASEAN countries in increasing access to digital infrastructure and encouraging the adoption of digital technology.

## REFERENCES

- ASEAN. 2021. ASEAN Digital Masterplan 2025. <https://asean.org>. Downloaded 28 Februari 2023.
- ASEAN. 2023. Boracay Digital Declaration. <https://asean.org>. Diunduh 12 Maret 2023.
- East Ventures Digital Competitiveness Index. Menuju Era Keemasan Digital Indonesia: Pemetaan Daya Saing Digital 34 Provinsi dan 25 Kota di Indonesia. East Ventures, Jakarta.
- Google, Temasek and Bain (2022). e-Conomy SEA 2022. Through the waves, towards a sea of opportunity. Google, Singapore.
- Ing. L.Y dan I. Markus. 2023. ASEAN Digital Community 2040. ERIA Policy Brief, Jakarta.
- Nasution, I.M. 2023. *MCI's view on: ASEAN Digital Economy Framework Agreement. TRADE Policy Advisory Group Leveraging ASEAN Chairmanship: Formulating Priority for SEAN Deliverables*. Jakarta, 23 February 2023. *Center of International Affairs Ministry of Communications and Informatics*.
- Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2021 tentang*

- Pengesahan ASEAN *Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan Asean Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 234. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Quallen, Brooklyn. 2021, April. E-Commerce Can End Rural Poverty in China. <https://borgenproject.org/end-rural-poverty-in-china/>.
- Speedtest 2022, Speedtest Global Index – Global Median Speeds, Mobile and Fixed Broadband Data. <https://www.speedtest.net/globalindex#mobile> (accessed 12 September 2022)
- Spence, Michael. 2021. Government and economics in the digital economy. *Journal of Government and Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.jge.2021.100020>.
- Tham S.Y. 2021. Digital Commitments in ASEAN's Free Trade Agreements. ISEAS, Singapore.
- Wihardja, M.M., *ASEAN's Digital Economy: Implementation Strategy for ASEAN Members. "Leveraging ASEAN Chairmanship: Formulating Priority for ASEAN Deliverables"*. Trade Policy Advisory Group. Ministry of Trade, February 23, 2023.
- Wong, Brian A. Wihardja, Maria Monica. 2022, Februari. Apa yang dapat dipelajari Indonesia dari transformasi ekonomi digital di China?. World Bank Blogs. <https://blogs.worldbank.org/id/eastasiapacific/what-can-indonesia-learn-from-china-digital-economic-transformation>.
- World Bank. 2021. Beyond Unicorns: Harnessing Digital Technologies for Inclusion in Indonesia. World Bank, Jakarta. East Ventures. 2022.
- Yuliani, Dinda. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia dan China dalam Bidang E-Commerce. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Zhang W, Zhao S, Wan X, Yao Y. 2021. Study on the effect of digital economy on highquality economic development in China. PLoS ONE 16(9): e0257365. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0257365>
- Zhang, Longmei. Chen, Selly. 2019. China's Digital Economy: Opportunities and Riks. International Monetary Fund WP/19/16 Pages 24. ISBN/ISSN:9781484389706/1018-5941.



TRADE - PAG #6

# Leveraging ASEAN Chairmanship: Formulating Priorities for ASEAN Deliverables



## Latar Belakang

1

ASEAN memiliki peluang untuk berakselerasi dan berada di garis depan ekonomi digital global. Penggerak utama transformasi digital ASEAN diantaranya karena ASEAN memiliki potensi yang luar biasa dengan fundamental ekonomi yang kuat seperti ukuran pasar yang besar dan menarik dengan 670 juta penduduk, cukup besarnya populasi kaum muda yang paham teknologi, dan penetrasi internet yang meningkat.

2

Adanya keseriusan pemerintah negara-negara ASEAN yang ditunjukkan dengan adanya perjanjian kerjasama di bidang digital semenjak awal 2000-an.



3

Digital transformation adalah salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia dan ASEAN.



4

Indonesia memiliki potensi sebagai *trend setter* dalam pengembangan transformasi digital di ASEAN.



ASEAN DIGITAL  
MASTERPLAN  
2025

## ASEAN DIGITAL MASTERPLAN 2025

Kerangka dasar kerja sama ekonomi digital di ASEAN saat ini masih didasarkan pada ASEAN Digital Masterplan (ADM) 2025.

### INDONESIA:

Kebijakan di tingkat ASEAN diintegrasikan dalam kebijakan nasional dalam upaya mendukung transformasi digital Indonesia. Kebijakan tersebut diantaranya **Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2021** tentang Pengesahan ASEAN *Agreement on Electronic Commerce* dan **Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022** tentang Perlindungan Data Pribadi.



## DIGITAL BORACAY DOCUMENT



Pada Februari 2023 dilakukan pertemuan Menteri Digital ASEAN di Boracay, Filipina, yang mempertegas isu *synergy towards a sustainable digital future* yang kemudian melahirkan *Digital Boracay Document*.

### ISU-ISU DALAM BORACAY DIGITAL DOCUMENT

#### ISU INKLUSIVITAS



- Peningkatan produktivitas.
- Penguatan kerjasama untuk mengurangi kensejangan digital antar negara ASEAN.

#### ISU KEBERLANJUTAN

- Implementasi kebijakan dengan kondisi pandemi Covid-19.
- Program inovatif untuk meluaskan cakupan wilayah.
- Mitigasi efek negatif perubahan iklim.

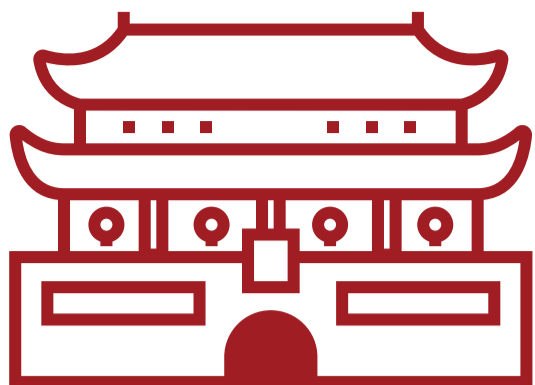


#### ISU PENGGUNA



- Transformasi digital yang berpusat pada manusia, aman, dan relevan bagi pengguna
- Adanya payung hukum sistem e-commerce yang tertuang dalam *The ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (AAEC).





## Lesson Learn:

# RTT

Perkembangan industri digital di RRT membawa RRT menjadi *global leader* pada beberapa aspek digital. Indonesia dan RRT sama-sama memiliki wilayah yang luas dan jumlah populasi yang tinggi sehingga Indonesia memiliki peluang mengimitasi kesuksesan RRT di bidang digital.

### Share Ekonomi Digital terhadap PDB Tiongkok

Salah satu negara yang terbukti berhasil memanfaatkan digitalisasi untuk peningkatan perekonomian adalah RRT. Kontribusi ekonomi digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) RRT mencapai 39,8% pada tahun 2021 dari 21,6% pada 2012.

39,8%



The Alibaba Group, e-commerce terbesar di Tiongkok melakukan program "*The Rural Taobao Program*" atau yang lebih dikenal dengan *Taobao Village*. Program ini telah membantu para petani desa mendapatkan akses internet yang lebih baik sehingga mereka dapat menjual hasil produk pertanian langsung ke konsumen.



### Hal penting yang dapat direplikasi Indonesia dalam mewujudkan transformasi ekonomi digital:

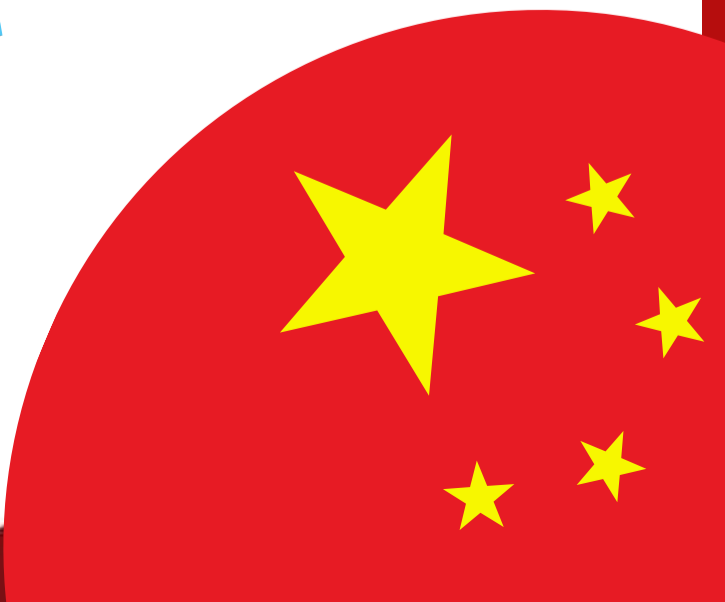


Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mendasar dan lebih sederhana seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang sehat dan berpendidikan.

Kolaborasi yang baik antara pihak pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan pihak swasta sebagai eksekutor.



Pembangunan karakter dengan memberikan motivasi pada wirausaha muda agar optimis dalam melaksanakan bisnis yang dimulai dari skala kecil.



## Hambatan dan Tantangan Transformasi Digital **Indonesia**

Indonesia memiliki permasalahan **digital divide within country** yang secara riil berdampak pada aspek inklusifitas dari transformasi digital. Laporan Beyond Unicorn World Bank (2021) menunjukkan bahwa generasi muda, pengguna berpendidikan tinggi serta individu yang berasal dari keluarga dengan status sosioekonomi tinggi memiliki level adopsi teknologi yang lebih tinggi.

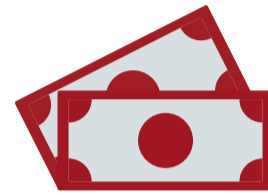
### Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Adopsi Teknologi Tinggi



Usia



Tingkat Pendidikan



Tingkat Pendapatan dan Status Sosial

Indonesia juga masih menunjukkan kinerja yang sub optimal terkait dengan **digital readiness** dibandingkan dengan beberapa *peer countries* lainnya di kawasan ASEAN.

**21.95 Mbps**



Kecepatan Internet Indonesia

**211.56 Mbps**

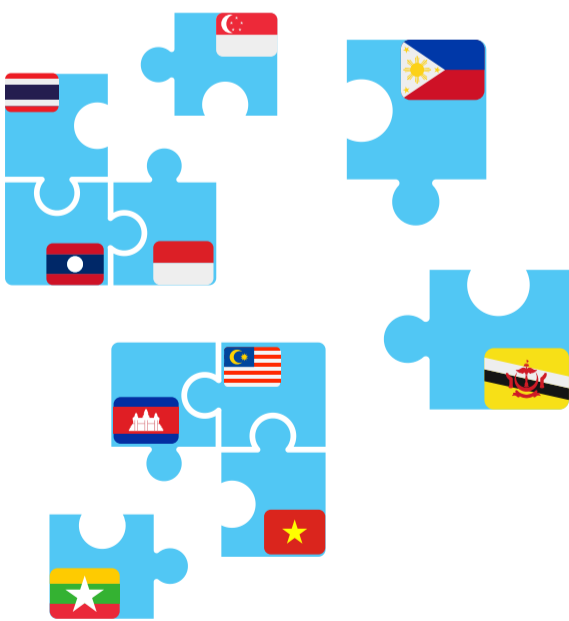


Kecepatan Internet Singapura

Ekonomi digital merupakan **crosscutting issue**, di mana yurisdiksi regulasi yang ada melibatkan banyak Kementerian dan Lembaga. Beberapa area yang perlu mendapatkan prioritas dari sisi regulasi adalah data privasi, *cybersecurity*, dan digital IP.



## Tantangan Transformasi Digital **ASEAN**



Terdapat hambatan regulasi Intra-ASEAN dan kurangnya pendekatan harmonisasi. Ada beberapa regulasi yang tidak koheren antar negara ASEAN terkait dengan *cybersecurity*, data non-pribadi, data pribadi, dan regulasi lainnya.

### Readiness



Negara anggota ASEAN memiliki kesenjangan dan kesiapan yang berbeda dalam menghadapi transformasi digital. Sebagai ilustrasi, Filipina memiliki kerangka regulasi paling komprehensif untuk *cybersecurity*. Sementara itu, dalam melindungi data non-pribadi, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam dianggap lebih maju karena telah membentuk HAKI untuk mencegah pembagian data non-pribadi.



**Brian A. Wong, B.A., M.B.A.**

Former Vice President, Alibaba Group  
Managing Director, Seaclif Partners Limited

”

Pemerintah harus memperkuat kemitraan dengan swasta dengan menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi bisnis untuk berkembang. Bisnis harus menciptakan platform dan alat untuk melayani kebutuhan bisnis. Selain itu, pemerintah dan swasta harus memberikan pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan bakat digital.

”

”

Pemerintah terus berusaha mempercepat dan meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan teknologi digital dengan berfokus pada empat hal yaitu percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan infrastruktur digital pemerintah, memperkuat tata kelola data, termasuk *cross border data flow*, dan perluasan komunikasi publik, termasuk melalui platform digital.

”



**Ichwan M. Nasution, S.SI., M.SC.**

Head of Center of Internasional Affairs,  
Ministry of Communication and Informatics Republic of Indonesia

”

Seperti perjanjian ASEAN lainnya, hal yang perlu ditekankan untuk ekonomi digital adalah *better enforcement* dan *better compliance* untuk membuat perjanjian tersebut efektif. Ada beberapa peraturan yang sudah terlalu lama tertunda seperti *data protection* dan *cyber security*. Standar untuk *data stewardship* juga sangat penting. Untuk mewujudkan masyarakat digital yang inklusif, maka diperlukan investasi pada *human capital*.

”



**Dr. Maria M. Wihardja**

Economist and Visiting Fellow  
ISAS Yusuf Ishak Institute

## Peran Pemerintah Indonesia

### 1 Mendukung dan memfasilitasi terwujudnya transformasi digital yang inklusif.



**Meningkatkan kerja sama antar kementerian** terkait demi mendorong kemajuan transformasi digital yang inklusif.

**Memfasilitasi para pelaku ekonomi**, seperti UMKM dan sektor informal untuk terintegrasi ke dalam ekonomi digital.



**Mendorong akses bantuan finansial** bagi UMKM dan sektor informal agar mereka dapat memiliki akses terhadap infrastruktur digital dan terintegrasi ke dalam ekonomi digital.

**Mengatasi kesenjangan antar wilayah** di Indonesia dalam hal akses layanan digital dan penyediaan infrastruktur fisik maupun infrastruktur digital.

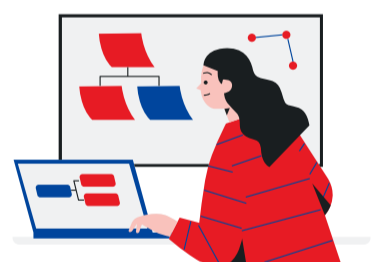


### 2 Memberikan prioritas dan memfasilitasi pelaku usaha dan sektor ekonomi dalam melakukan inovasi digital teknologi yang memberikan manfaat dan membantu aktivitas manusia.



Mendorong pengembangan inovasi digital teknologi yang tepat guna dan *human-centric*.

Memberikan prioritas pada pengembangan SDM, agar tenaga kerja dan calon tenaga kerja dapat meningkatkan kapasitas dan keterampilannya, serta ikut mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Salah satunya melalui pendidikan berbasis teknologi.



### 3 Memfokuskan pada peraturan pemerintah dalam rangka penyempurnaan undang-undang keamanan siber, privasi data, dan peraturan persaingan.



Mempromosikan penerapan standar keamanan siber, keamanan data, dan kebijakan privasi yang konsisten di dalam negeri.

Mendorong dunia usaha untuk bersaing secara sehat dan mengembangkan ekonomi digital. Undang-undang persaingan harus dipatuhi untuk menjaga pasar tetap dinamis dan inovatif.



Mengatur, mengawasi, dan mencegah dominasi atau monopoli para pemain teknologi besar dalam pasar digital.

Memastikan peraturan yang berlaku harus selalu berkembang dan fleksibel terhadap transformasi digital yang dinamis.



# Rekomendasi Kebijakan

## 4 Melakukan pemetaan kesiapan digital Indonesia.



Memberikan elaborasi mengenai karakteristik, posisi kekuatan dan tantangan kesiapan digital Indonesia, serta melakukan studi komparasi pada level regional ASEAN.



Mengedepankan prinsip kehati-hatian serta memprioritaskan posisi dan kepentingan Indonesia dalam penyusunan posisi runding dan kerja sama ekonomi digital.

## Rekomendasi Khusus

### Dalam ruang lingkup Keketuaan ASEAN untuk memperkuat *digital readiness* menghadapi ASEAN DEFA

# 1

Mengkonstruksikan kerangka peraturan yang koheren untuk ekonomi digital sebagai upaya kolektif prioritas yang harus dilakukan untuk mempromosikan transparansi dalam desain dan implementasi peraturan digital intra ASEAN.

# 2

Perlunya pemahaman yang sama pada lingkup ASEAN mengenai apa itu teknologi tepat guna (*appropriate technology*) sebagai upaya untuk membentuk ASEAN *Digital Community* di masa depan.

# 3

Perlu upaya bersama untuk membangun *enabling ecosystem* dalam rangka meningkatkan daya tarik *business group* di ASEAN untuk melakukan diversifikasi bisnisnya pada digital teknologi.

# 5

Mendorong akselerasi akses *microfinancing* di ASEAN sehingga mampu *peer to peer* kepada *small enterprises* agar mampu mendapatkan akses terhadap infrastruktur digital dan terintegrasi ke dalam ekonomi digital (inklusif).

# 4

Perlu pemetaan elemen kunci dan prioritas dari digital ekonomi yang akan diadopsi dalam ASEAN DEFA.

# 6

Diperlukan kesepakatan dan kerja sama berupa program akselerasi transformasi digital yang inklusif dalam upaya mengurangi kesenjangan dalam kesiapan digital antar negara ASEAN.



**ASEAN  
INDONESIA  
2023**



ASEAN MATTERS:  
EPICENTRUM  
OF GROWTH

#### Disclaimer:

Trade Policy Advisory Group (Trade-PAG) merupakan forum kolaborasi antara Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag), ERIA, dan ITAPS IPB yang bertujuan memberikan saran kebijakan kepada Menteri Perdagangan terkait isu terkini dan isu strategis di bidang perdagangan. Dokumen ini disusun hanya sebatas sebagai informasi. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar, tetapi tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut akurat dan lengkap serta tidak ada kewajiban yang timbul terhadap kerugian yang terjadi atas tindakan yang dilakukan dengan mendasarkan pada laporan ini.

@Hak Cipta Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan

TRADE - PAG #6

# Leveraging ASEAN Chairmanship: Formulating Priorities for ASEAN Deliverables



*Disclaimer: Trade Policy Advisory Group (Trade-PAG) merupakan forum kolaborasi antara Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag), ERIA, dan ITAPS IPB yang bertujuan memberikan saran kebijakan kepada Menteri Perdagangan terkait isu terkini dan isu strategis di bidang perdagangan. Dokumen ini disusun hanya sebatas sebagai informasi. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar, tetapi tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut akurat dan lengkap serta tidak ada kewajiban yang timbul terhadap kerugian yang terjadi atas tindakan yang dilakukan dengan mendasarkan pada laporan ini.*

@Hak Cipta Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan

# Latar Belakang

**1** ASEAN memiliki peluang untuk berakselerasi dan berada di garis depan ekonomi digital global.

Penggerak utama transformasi digital ASEAN diantaranya karena ASEAN memiliki potensi yang luar biasa dengan fundamental ekonomi yang kuat seperti ukuran pasar yang besar dan menarik dengan 670 juta penduduk, cukup besarnya populasi kaum muda yang paham teknologi, dan penetrasi internet yang meningkat.



**2** Adanya keseriusan pemerintah negara-negara ASEAN yang ditunjukkan dengan adanya perjanjian kerjasama di bidang digital semenjak awal 2000-an.



**3** Digital transformation adalah salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia dan ASEAN.

**4** Indonesia memiliki potensi sebagai trend setter dalam pengembangan transformasi digital di ASEAN.



## ASEAN DIGITAL MASTERPLAN 2025

Kerangka dasar kerja sama ekonomi digital di ASEAN saat ini masih didasarkan pada ASEAN Digital Masterplan (ADM) 2025.

## DIGITAL BORACAY DOCUMENT

Pada Februari 2023 dilakukan pertemuan Menteri Digital ASEAN di Boracay, Filipina, yang mempertegas isu *synergy towards a sustainable digital future* yang kemudian melahirkan *Digital Boracay Document*.

### ISU INKLUSIVITAS

- Peningkatan produktivitas.
- Penguatan kerjasama untuk mengurangi kensejangan digital antar negara ASEAN.

### ISU KEBERLANJUTAN

- Implementasi kebijakan dengan kondisi pandemi Covid-19.
- Program inovatif untuk meluaskan cakupan wilayah.
- Mitigasi efek negatif perubahan iklim.

### ISU PENGGUNA

- Transformasi digital yang berpusat pada manusia dipastikan aman dan relevan bagi pengguna.
- Adanya payung hukum sistem *e-commerce* yang tertuang dalam *The ASEAN Agreement on Electronic Commerce (AAEC)*.



## ASEAN DIGITAL MASTERPLAN 2025

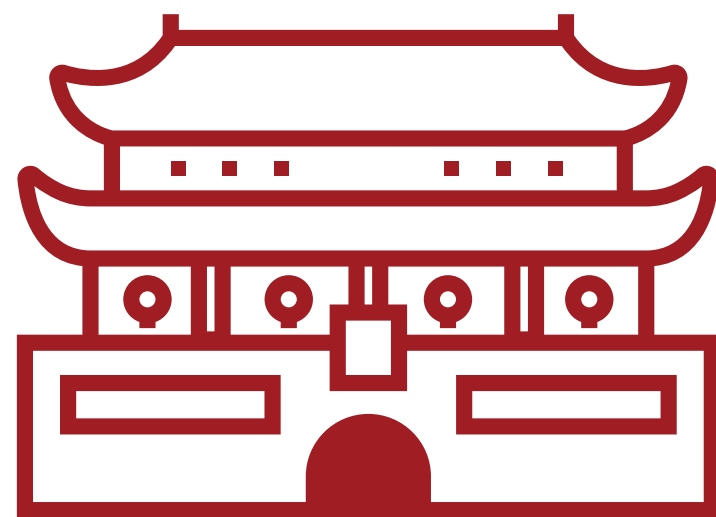
## INDONESIA:

Kebijakan di tingkat ASEAN diintegrasikan dalam kebijakan nasional dalam upaya mendukung transformasi digital Indonesia. Kebijakan tersebut diantaranya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.






## Share Ekonomi Digital terhadap PDB RRT




Salah satu negara yang terbukti berhasil memanfaatkan digitalisasi untuk peningkatan perekonomian adalah RRT. Kontribusi ekonomi digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) RRT mencapai 39,8% pada tahun 2021 dari 21,6% pada 2012.


### Tiga hal penting yang dapat direplikasi Indonesia dalam mewujudkan transformasi ekonomi digital:



Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mendasar dan lebih sederhana seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang sehat dan berpendidikan.



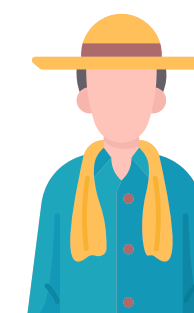
Kolaborasi yang baik antara pihak pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan pihak swasta sebagai eksekutor.



Pembangunan karakter dengan memberikan motivasi pada wirausaha muda agar optimis dalam melaksanakan bisnis yang dimulai dari skala kecil.

## Lesson Learn: RRT

Perkembangan industri digital di RRT membawa RRT menjadi *global leader* pada beberapa aspek digital. Indonesia dan RRT sama-sama memiliki wilayah yang luas dan jumlah populasi yang tinggi sehingga Indonesia memiliki peluang mengimitasi kesuksesan RRT di bidang digital.



The Alibaba Group, *e-commerce* terbesar di RRT melakukan program “*The Rural Taobao Program*” atau yang lebih dikenal dengan *Taobao Village*. Program ini telah membantu para petani desa mendapatkan akses internet yang lebih baik sehingga mereka dapat menjual hasil produk pertanian langsung ke konsumen.



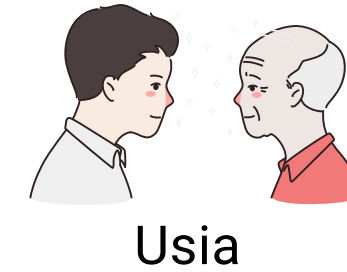
# Hambatan dan Tantangan Transformasi Digital

# Indonesia

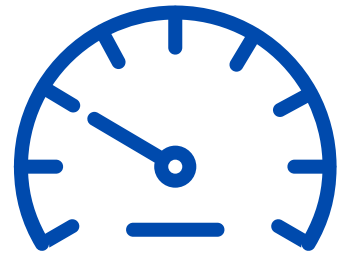
## Deskripsi Masalah

Indonesia memiliki permasalahan **digital divide within country** yang secara riil berdampak pada aspek inklusifitas dari transformasi digital. Laporan Beyond Unicorn World Bank (2021) menunjukkan bahwa generasi muda, pengguna berpendidikan tinggi, serta individu yang berasal dari keluarga dengan status sosioekonomi tinggi memiliki level adopsi teknologi yang lebih tinggi.

### Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Adopsi Teknologi Tinggi

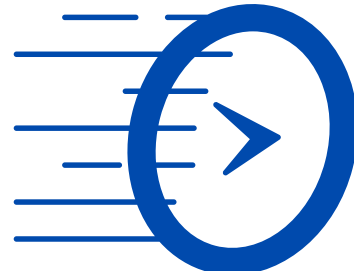


21.95 Mbps



Kecepatan Internet Indonesia

211.56 Mbps

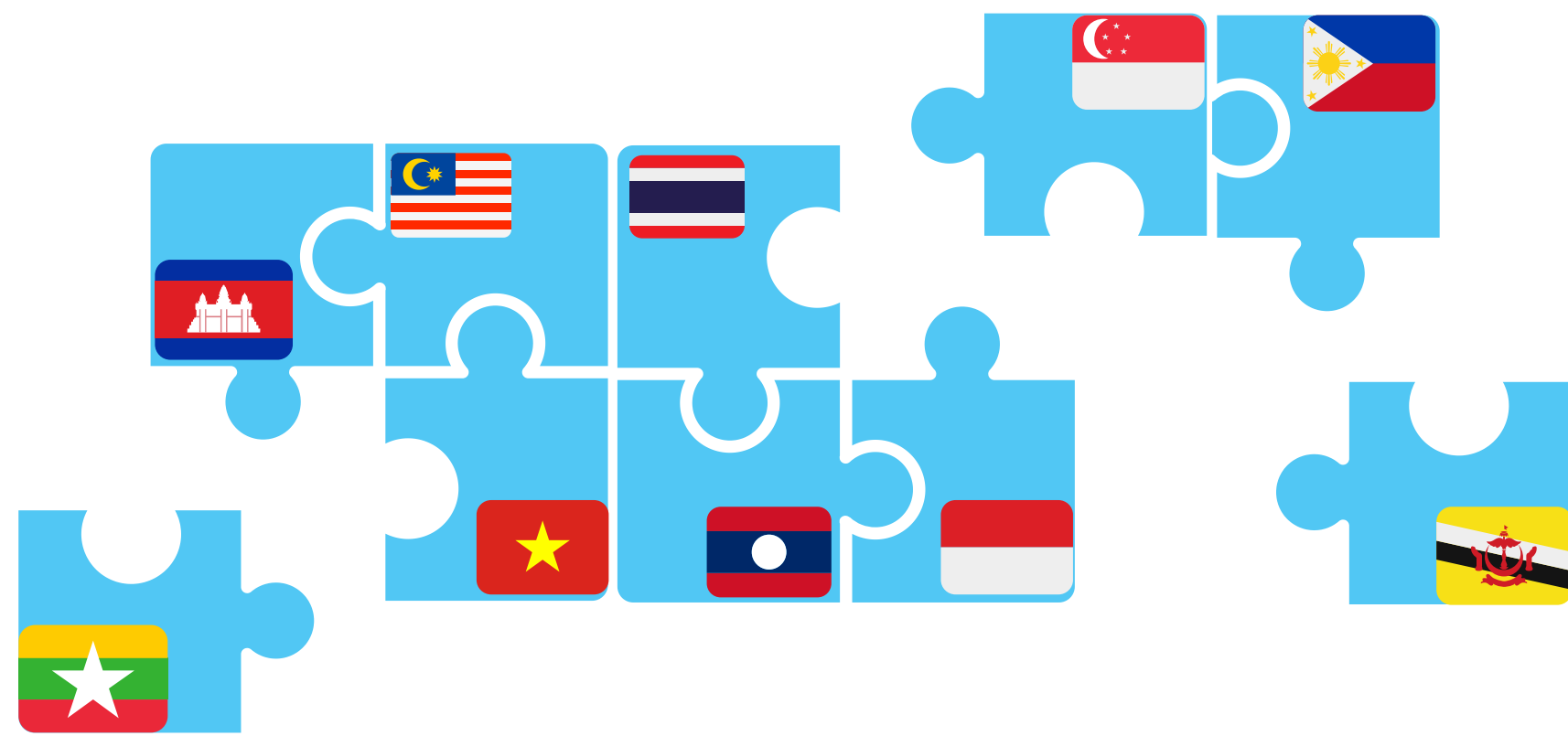


Kecepatan Internet Singapura

Indonesia juga masih menunjukkan kinerja yang sub optimal terkait dengan **digital readiness** dibandingkan dengan beberapa *peer countries* lainnya di kawasan ASEAN.

Ekonomi digital merupakan **crosscutting issue**, di mana yurisdiksi regulasi yang ada melibatkan banyak Kementerian dan Lembaga. Beberapa area yang perlu mendapatkan prioritas dari sisi regulasi adalah data privasi, *cybersecurity*, dan digital IP.





Hambatan regulasi Intra-ASEAN dan kurangnya pendekatan harmonisasi. Ada beberapa regulasi yang tidak koheren antar negara ASEAN terkait dengan *cybersecurity*, data non-pribadi, data pribadi, dan regulasi lainnya.

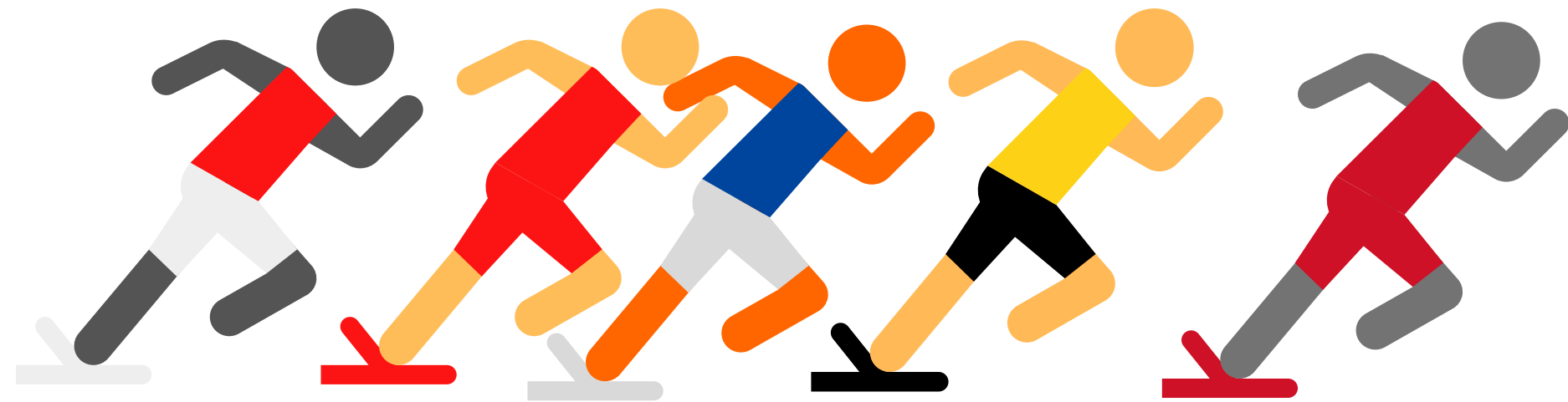
## Tantangan Transformasi Digital



# ASEAN

## Deskripsi Masalah

# Readiness



Negara anggota ASEAN memiliki kesenjangan dan kesiapan yang berbeda dalam menghadapi transformasi digital. Sebagai ilustrasi, Filipina memiliki kerangka regulasi paling komprehensif untuk *cybersecurity*. Sementara itu, dalam melindungi data non-pribadi, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam dikonsiderasikan lebih maju karena telah membentuk HAKI untuk mencegah pembagian data non-pribadi.

# Kutipan Pakar

”

Pemerintah harus memperkuat kemitraan dengan swasta dengan menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi bisnis untuk berkembang. Bisnis harus menciptakan platform dan alat untuk melayani kebutuhan bisnis. Selain itu, pemerintah dan swasta harus memberikan pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan bakat digital.

**Brian A. Wong, B.A., M.B.A.**

**Former Vice President, Alibaba Group  
Managing Director, Seaclif Partners Limited**

”

# Kutipan Pakar

”

Pemerintah terus berusaha mempercepat dan meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan teknologi digital dengan berfokus pada empat hal, yaitu percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatkan infrastruktur digital pemerintah, memperkuat tata kelola data, termasuk *cross border data flow*, dan perluasan komunikasi publik termasuk melalui platform digital.

**Ichwan M. Nasution, S.SI., M.SC.**

Head of Center of Internasional Affairs,  
Ministry of Communication an Informatics Republic of Indonesia

”

# Kutipan Pakar

”

Seperti perjanjian ASEAN lainnya, hal yang perlu ditekankan untuk ekonomi digital adalah *better enforcement* dan *better compliance* untuk membuat perjanjian tersebut efektif. Ada beberapa peraturan yang sudah terlalu lama tertunda seperti *data protection* dan *cyber security*. Standar untuk *data stewardship* juga sangat penting. Untuk mewujudkan masyarakat digital yang inklusif, maka diperlukan investasi pada *human capital*.



Dr. Maria M. Wihardja

Economist and Visiting Fellow  
ISAS Yusuf Ishak Institute

”

# Rekomendasi Kebijakan

**Strategi Memperkuat  
*Digital Readiness*  
dalam Menghadapi**

# ASEAN



# DEFA

*(Digital Economy Framework Agreement)*

- Mendukung dan memfasilitasi terwujudnya transformasi digital yang inklusif.
- Memberikan prioritas dan memfasilitasi pelaku usaha dan sektor ekonomi dalam melakukan inovasi digital teknologi yang memberikan manfaat dan membantu aktivitas manusia.
- Memfokuskan pada peraturan pemerintah dalam rangka penyempurnaan undang-undang keamanan siber, privasi data, dan peraturan persaingan.
- Melakukan pemetaan kesiapan digital Indonesia.

# Peran Pemerintah Indonesia

## Mendukung dan memfasilitasi terwujudnya transformasi digital yang inklusif.



**Meningkatkan kerja sama antar kementerian** terkait demi mendorong kemajuan transformasi digital yang inklusif.



**Mendorong akses bantuan finansial** bagi UMKM dan sektor informal agar mereka dapat memiliki akses terhadap infrastruktur digital dan terintegrasi ke dalam ekonomi digital.



**Memfasilitasi para pelaku ekonomi**, seperti UMKM dan sektor informal untuk terintegrasi ke dalam ekonomi digital.



**Mengatasi kesenjangan antar wilayah** di Indonesia dalam hal akses layanan digital dan penyediaan infrastruktur fisik maupun infrastruktur digital.

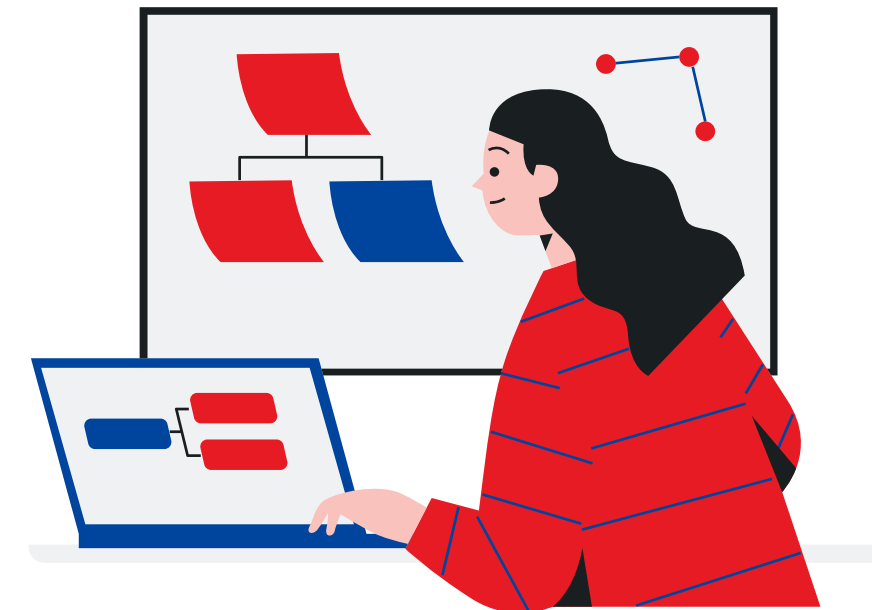


# Peran Pemerintah Indonesia

**Memberikan prioritas dan memfasilitasi pelaku usaha dan sektor ekonomi dalam melakukan inovasi digital teknologi yang memberikan manfaat dan membantu aktivitas manusia.**



Mendorong pengembangan inovasi digital teknologi yang tepat guna dan *human-centric*.



Memberikan prioritas pada pengembangan SDM, agar tenaga kerja dan calon tenaga kerja dapat meningkatkan kapasitas dan keterampilannya, serta ikut mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Salah satunya melalui pendidikan berbasis teknologi.

# Peran Pemerintah Indonesia

**Memfokuskan pada peraturan pemerintah dalam rangka penyempurnaan undang-undang keamanan siber, privasi data, dan peraturan persaingan.**



Mempromosikan penerapan standar keamanan siber, keamanan data, dan kebijakan privasi yang konsisten di dalam negeri.



Mendorong dunia usaha untuk bersaing secara sehat dan mengembangkan ekonomi digital. Undang-undang persaingan harus dipatuhi untuk menjaga pasar tetap dinamis dan inovatif.



Mengatur, mengawasi, dan mencegah dominasi atau monopoli para pemain teknologi besar dalam pasar digital.



Memastikan peraturan yang berlaku harus selalu berkembang dan fleksibel terhadap transformasi digital yang dinamis.

# Peran Pemerintah Indonesia

## Melakukan pemetaan kesiapan digital Indonesia.



Memberikan elaborasi mengenai karakteristik, posisi kekuatan dan tantangan kesiapan digital Indonesia, serta melakukan studi komparasi pada level regional ASEAN.



Mengedepankan prinsip kehati-hatian serta memprioritaskan posisi dan kepentingan Indonesia dalam penyusunan posisi runding dan kerja sama ekonomi digital.

# Rekomendasi Khusus

## Dalam ruang lingkup Keketuaan ASEAN untuk memperkuat *digital readiness* menghadapi ASEAN DEFA

**1** Mengkonstruksikan kerangka peraturan yang koheren untuk ekonomi digital sebagai upaya kolektif prioritas yang harus dilakukan untuk mempromosikan transparansi dalam desain dan implementasi peraturan digital intra ASEAN.

**2** Perlunya pemahaman yang sama pada lingkup ASEAN mengenai apa itu teknologi tepat guna (*appropriate technology*) sebagai upaya untuk membentuk ASEAN *Digital Community* di masa depan.

**3** Perlu pemetaan elemen kunci dan prioritas dari digital ekonomi yang akan diadopsi dalam ASEAN DEFA.



**4** Perlu upaya bersama untuk membangun *enabling ecosystem* dalam rangka meningkatkan daya tarik *business group* di ASEAN untuk melakukan diversifikasi bisnisnya pada digital teknologi.

**5** Mendorong akselerasi akses *microfinancing* di ASEAN sehingga mampu *peer to peer* kepada *small enterprises* agar mampu mendapatkan akses terhadap infrastruktur digital dan terintegrasi ke dalam ekonomi digital (inklusif).

**6** Diperlukan kesepakatan dan kerja sama berupa program akselerasi transformasi digital yang inklusif dalam upaya mengurangi kesenjangan dalam kesiapan digital antar negara ASEAN.

# Terima Kasih

**KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA** **ERIA** **IPB University** **ASEAN INDONESIA 2023**

**TradePAG #6**

**ASEAN Chairmanship: Formulating Priorities for ASEAN Deliverables**

**KEY EXPERT**

**BRIAN A. WONG, B.A., M.B.A.**  
Former Vice President, Alibaba Group  
Managing Director, Seacliff Partners Limited  
“ASEAN’s Digital Economy:  
Implementation Strategy for  
ASEAN Members”

**PANELISTS**

**ICHWAN M. NASUTION, S.SI., M.SC.**  
Head of Center of International Affairs,  
Ministry of Communications and Informatics,  
Republic of Indonesia

**DR. MARIA M. WIHARDJA**  
Economist and Visiting Fellow  
ISEAS-Yusof Ishak Institute

**MODERATOR**

**DR. ALADDIN D. RILLO**  
Senior Economic Advisor for ERIA and  
Former Deputy Secretary General for  
ASEAN Economic Community

**THURSDAY, FEBRUARY 23<sup>rd</sup>, 2023**  
09.00 - 13.00 WIB

**MoT Office JAKARTA**

[www.bkperdag.kemendag.go.id](http://www.bkperdag.kemendag.go.id) Badan Kebijakan Perdagangan **Policy for Better Trade**